



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.1268-Org/2026
TENTANG
PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peta Jabatan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.4446-Bagor/2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana, terdapat perubahan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan nomenklatur jabatan yang harus disesuaikan sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- | | | |
|---------|---|---|
| KESATU | : | Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. |
| KEDUA | : | Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. |
| KETIGA | : | Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai bahan dalam penataan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. |
| KEEMPAT | : | Penataan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi penyusunan formasi, pengangkatan, penetapan pegawai dalam jabatan dan pedoman mekanisme kerja. |
| KELIMA | : | Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.4446-Bagor/2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

- KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

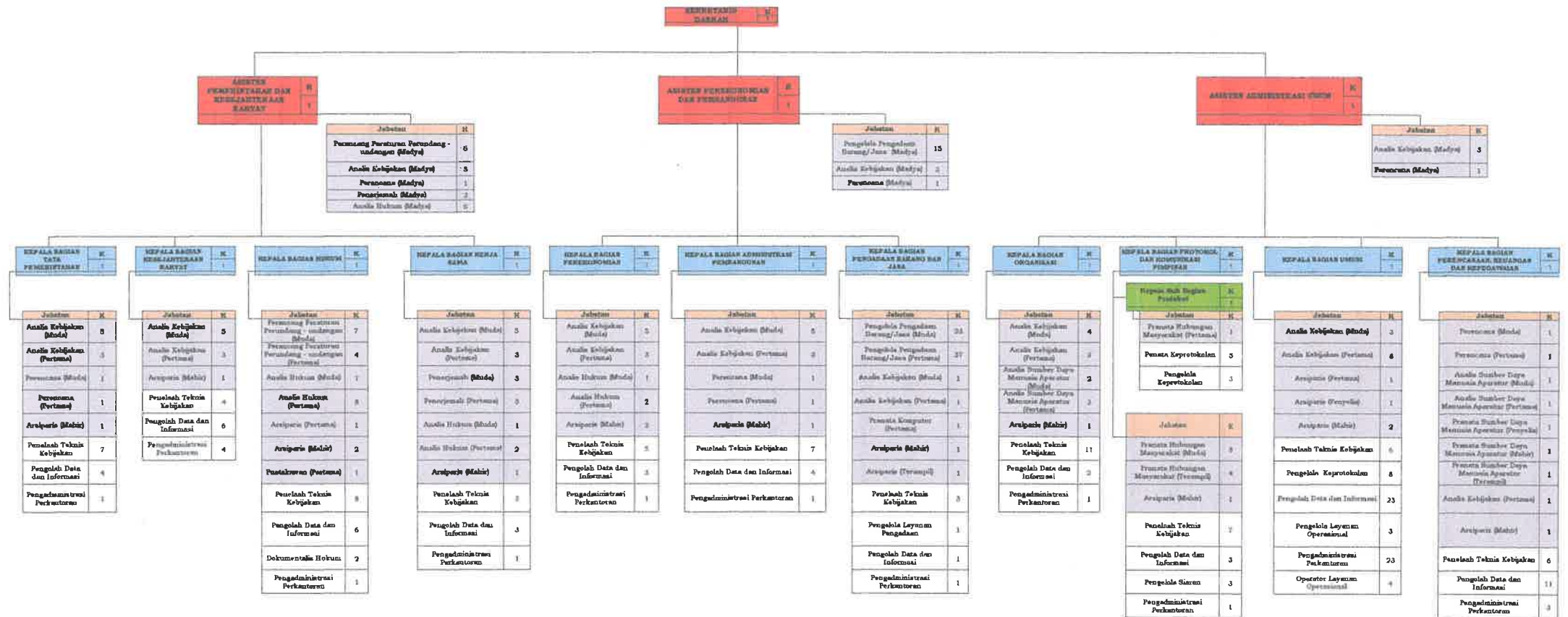
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/kep.1268-0rg/2026
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PETA JABATAN SEKRETARIAT DAERAH



PETA JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	K
	1

Jabatan	K
Analisis Kebijakan (Madya)	2
Analisis Hukum (Madya)	1
Perisalah Legislatif (Madya)	2

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	K
	1

Kepala Bagian Umum	K
	1

Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	K
	1

Kepala Bagian Program dan Keuangan	K
	1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawalan	K
	1
Jabatan	K
Arsiparis (Pertama)	1
Arsiparis (Mahir)	1
Arsiparis (Terampil)	1
Asisten Perpustakaan (Mahir)	1
Asisten Perpustakaan (Terampil)	1
Penelaah Teknis Kebijakan	1
Pengolah Data dan Informasi	3
Pengadministrasi Perkantoran	4

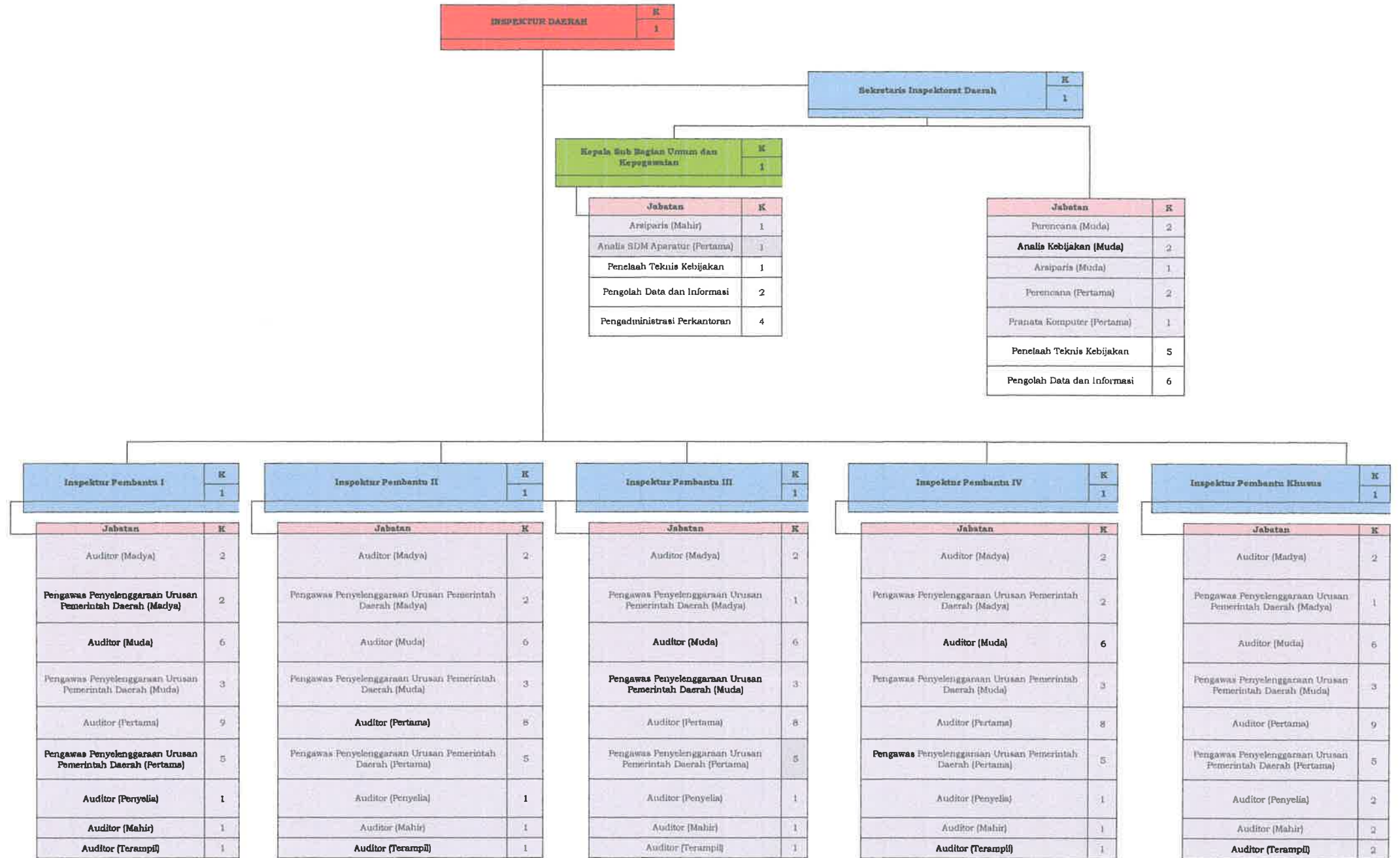
Jabatan	K
Perisalah Legislatif (Muda)	3
Perisalah Legislatif (Pertama)	3
Pranata Hubungan Masyarakat (Muda)	1
Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Muda)	1
Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Pertama)	1
Asisten Perisalah Legislatif (Penyelia)	1
Asisten Perisalah Legislatif (Mahir)	2
Asisten Perisalah Legislatif (Terampil)	3
Penelaah Teknis Kebijakan	9
Penata Keprotokolan	4
Pengelola Siaran	1
Pengolah Data dan Informasi	2
Dokumentalis Hukum	1
Pengelola Keprotokolan	11
Pengadministrasi Perkantoran	2

Jabatan	K
Analisis Kebijakan (Muda)	2
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Pengelola Layanan Operasional	7
Operator Layanan Operasional	2

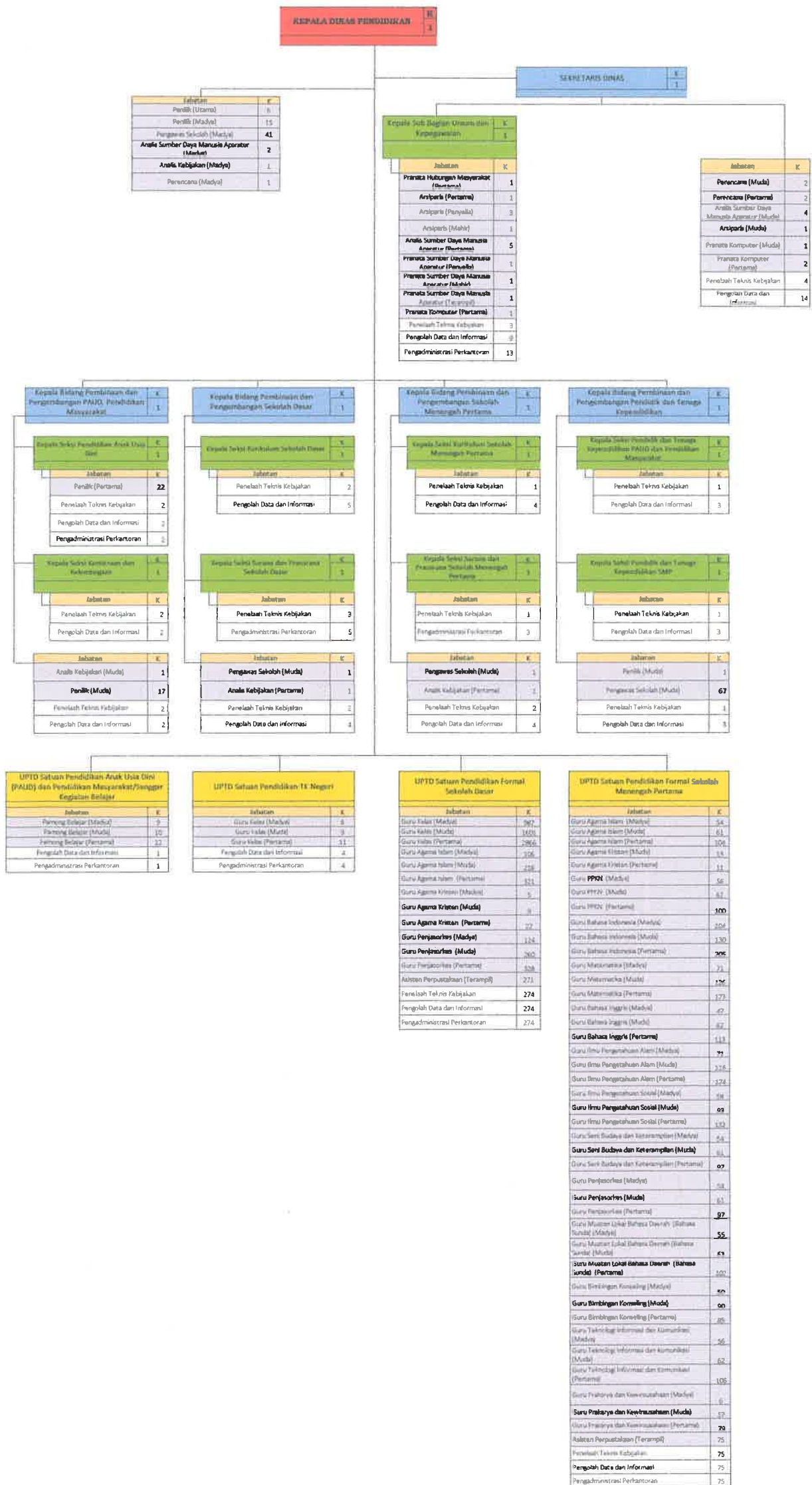
Jabatan	K
Analisis Kebijakan (Muda)	3
Analisis Kebijakan (Pertama)	7
Analisis Hukum (Muda)	2
Analisis Hukum (Pertama)	4
Perisalah Legislatif (Muda)	2
Perisalah Legislatif (Pertama)	4
Asisten Perisalah Legislatif (Penyelia)	2
Asisten Perisalah Legislatif (Mahir)	3
Asisten Perisalah Legislatif (Terampil)	3
Penelaah Teknis Kebijakan	8
Pengolah Data dan Informasi	5
Pengadministrasi Perkantoran	1

Jabatan	K
Perencana (Muda)	1
Perencana (Pertama)	1
Pranata Komputer (Terampil)	1
Penelaah Teknis Kebijakan	5
Pengolah Data dan Informasi	7

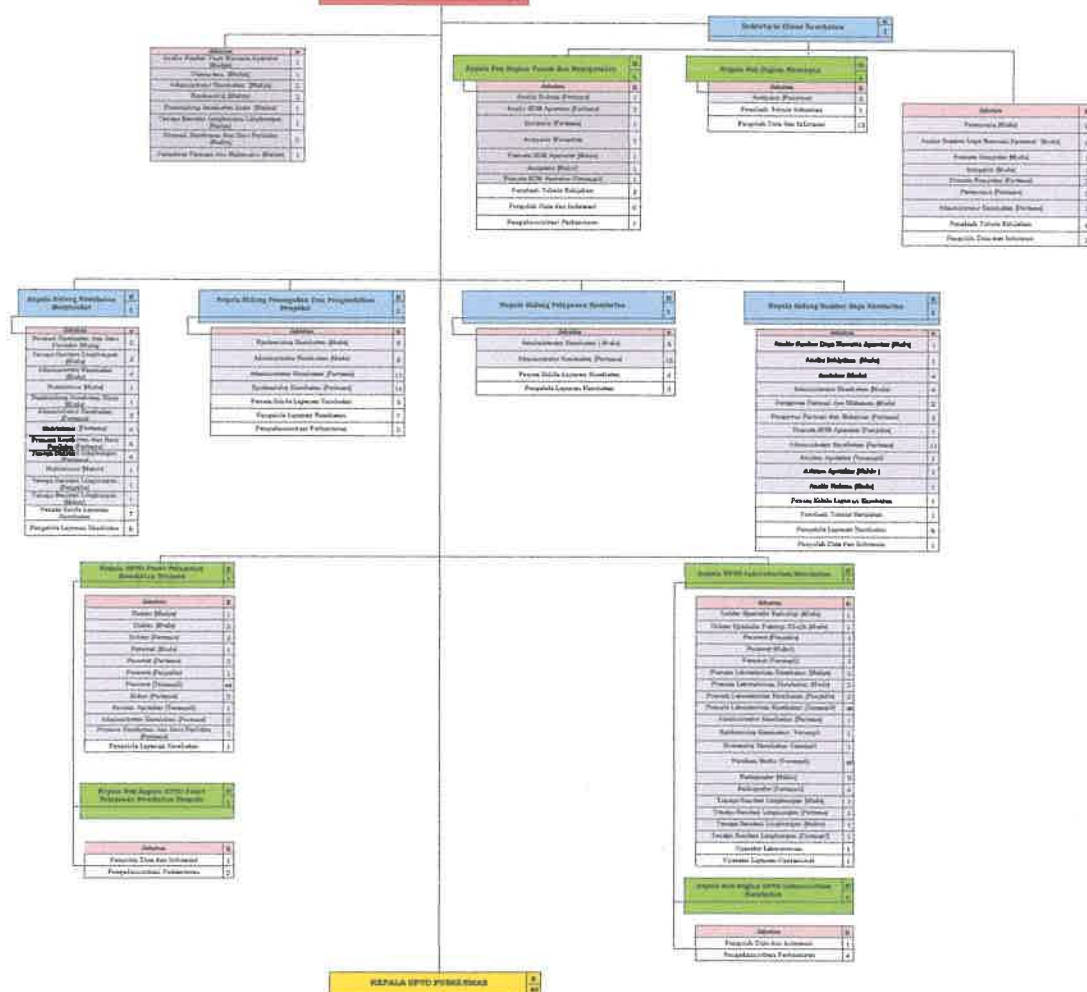
PETA JABATAN INSPEKTORAT DAERAH

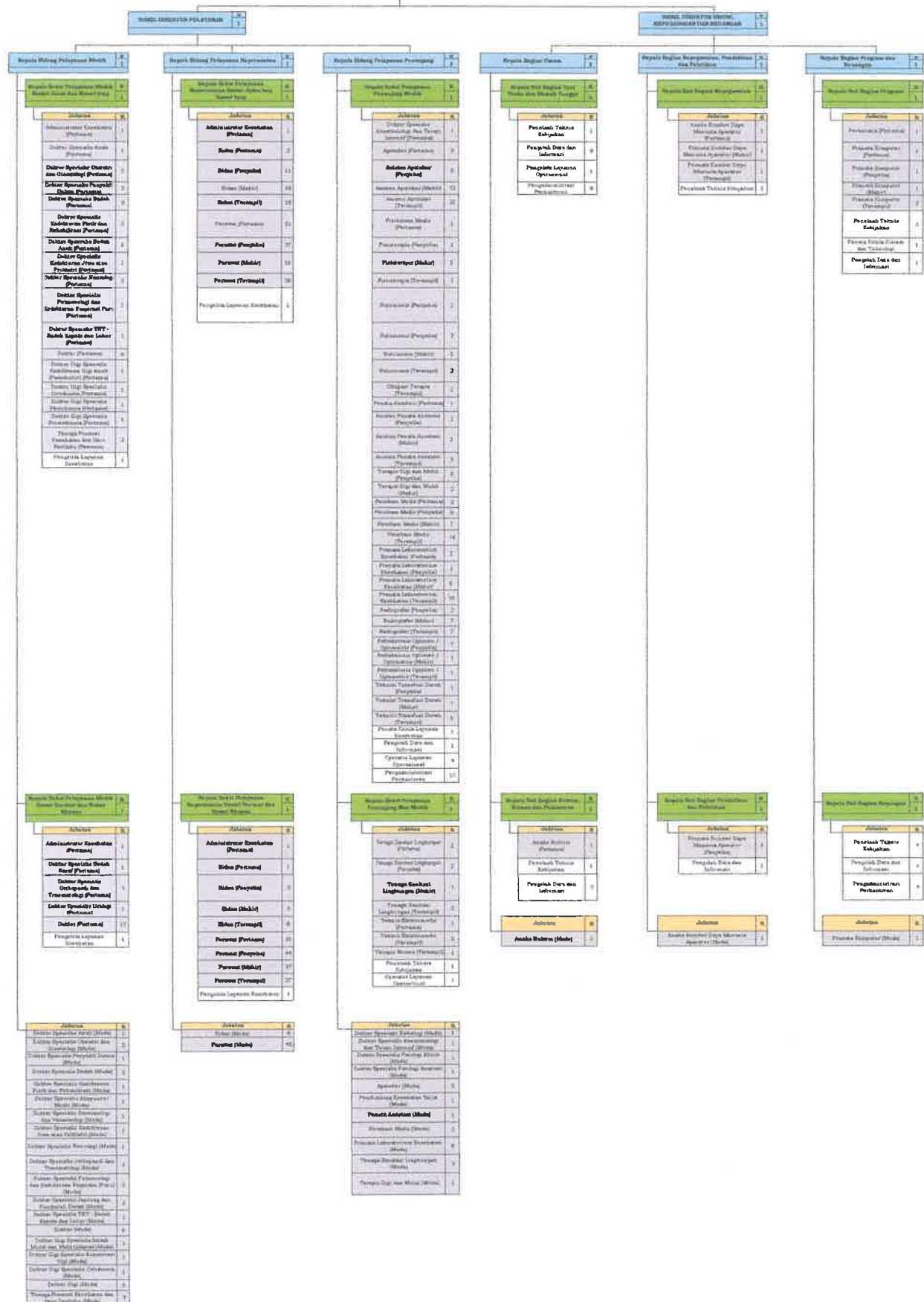


PETA JABATAN DINAS PENDIDIKAN



WELFARE TRADING INTERNATIONAL

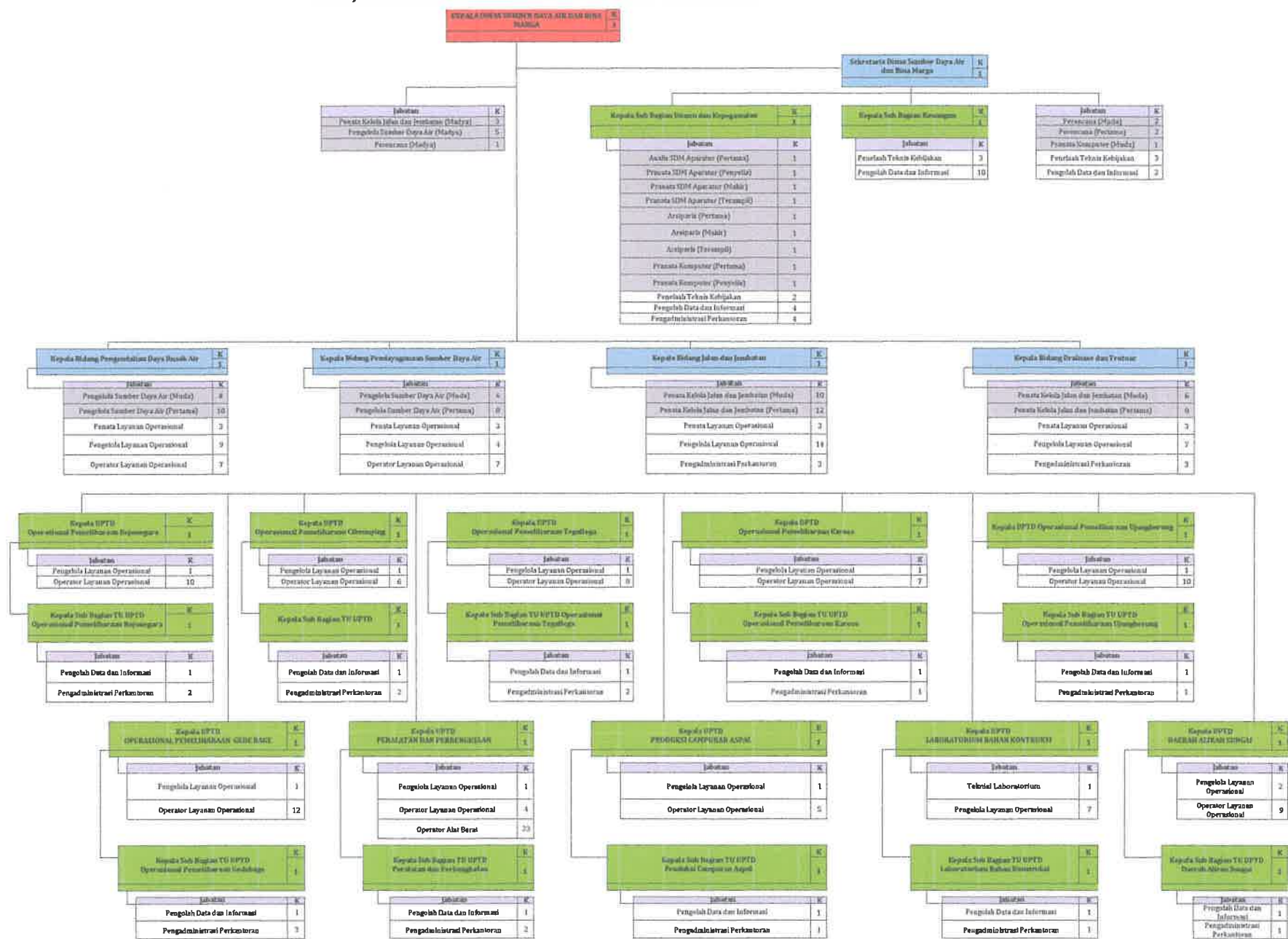


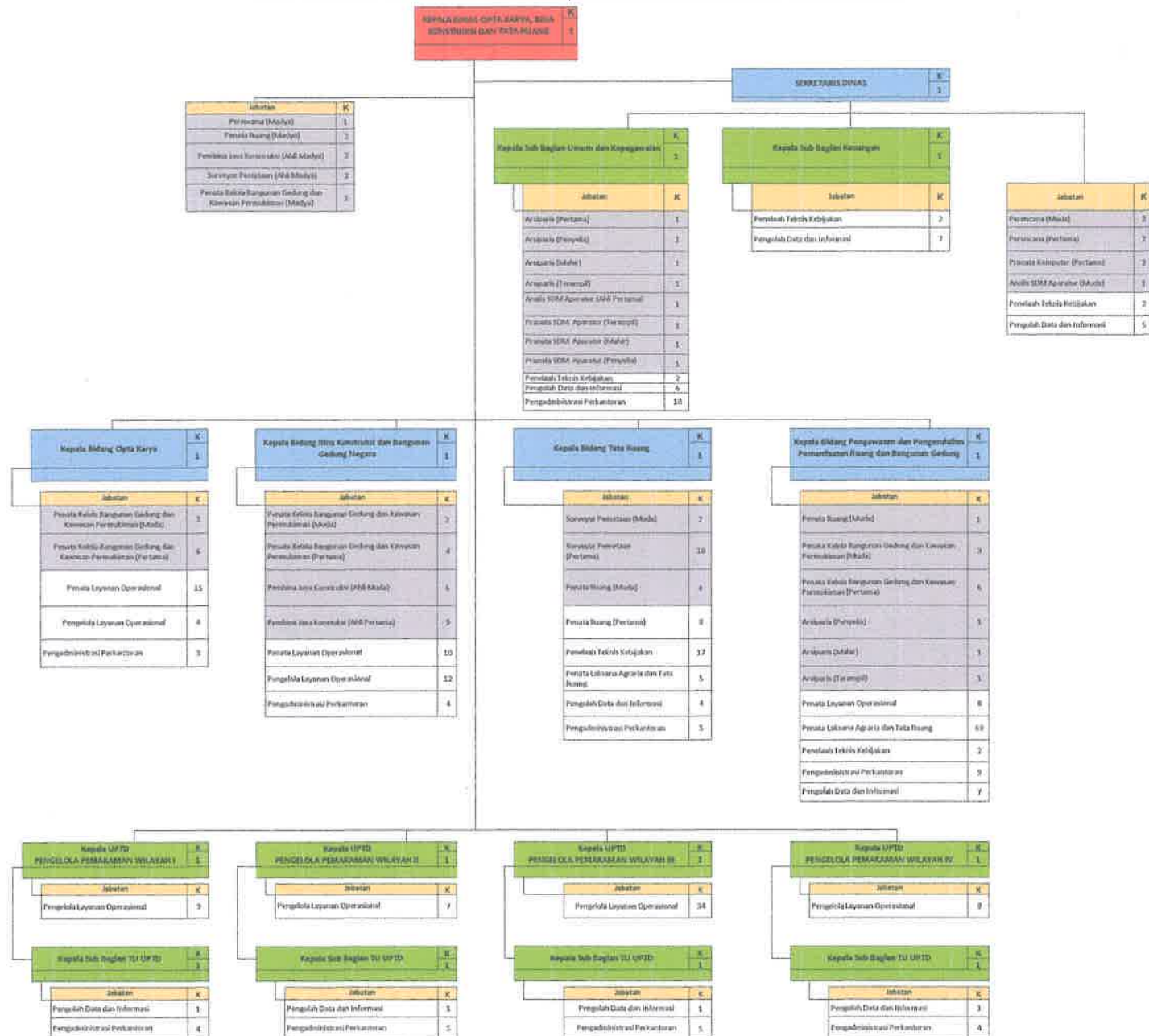
[illegible]



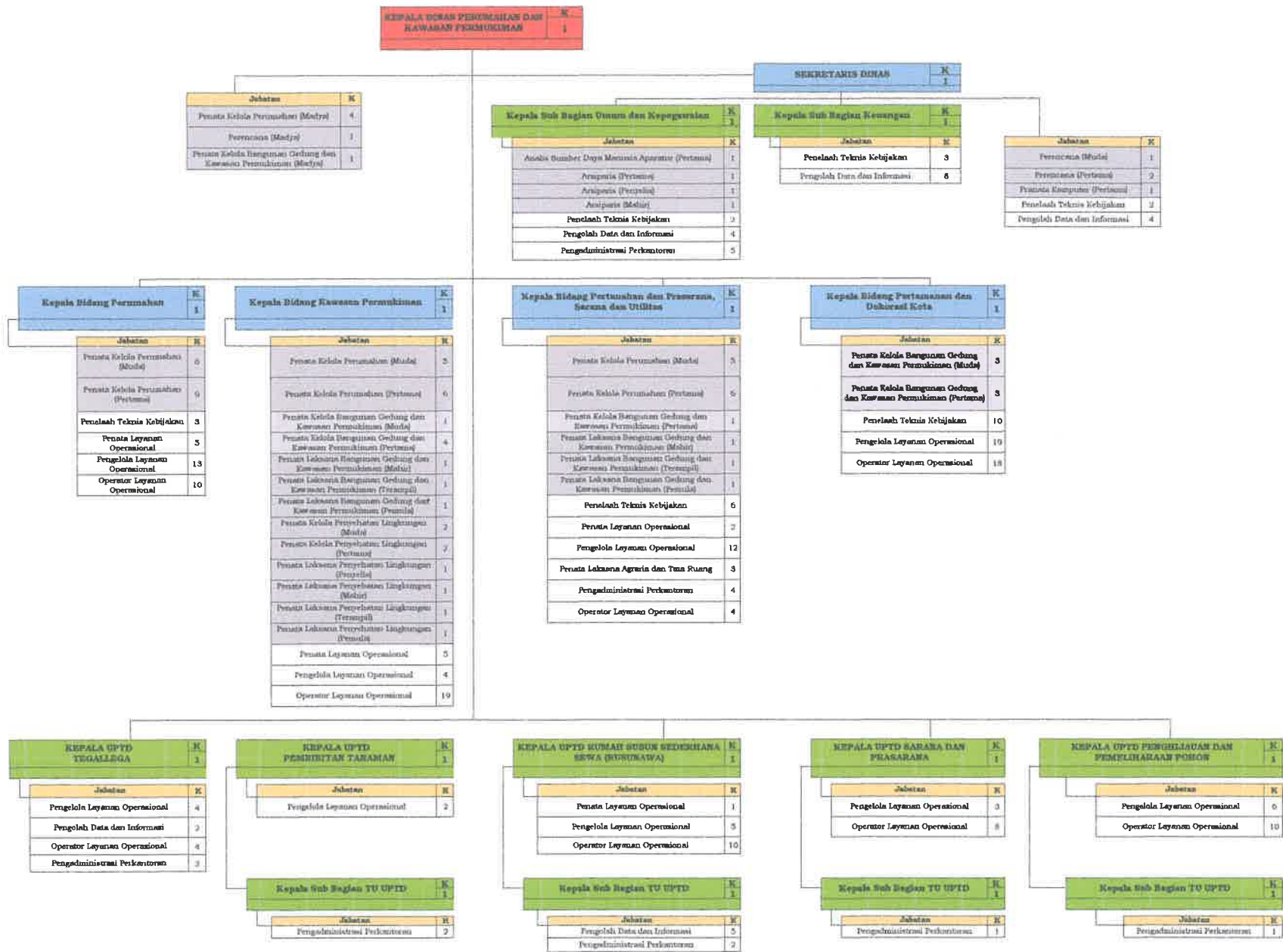
Jabatan	U
Apoteker (Muda)	1
Perawat Anestesi (Muda)	1
Tekniks Elektro-mech (Muda)	1
Pembimbing Kesehatan Kerja (Muda)	1
Tenaga Kesehatan Lingkungan Sekolah	-

PETA JABATAN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

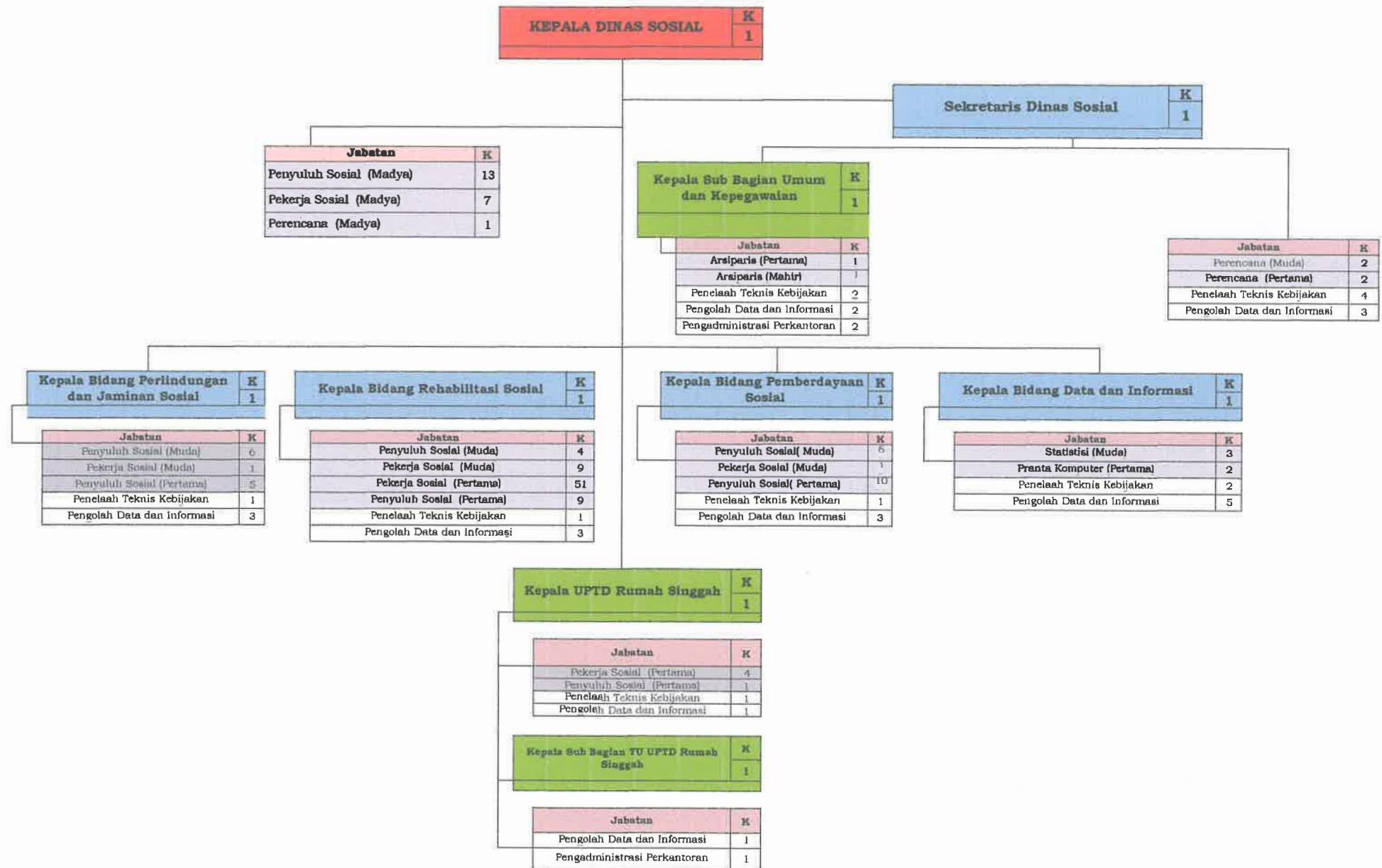




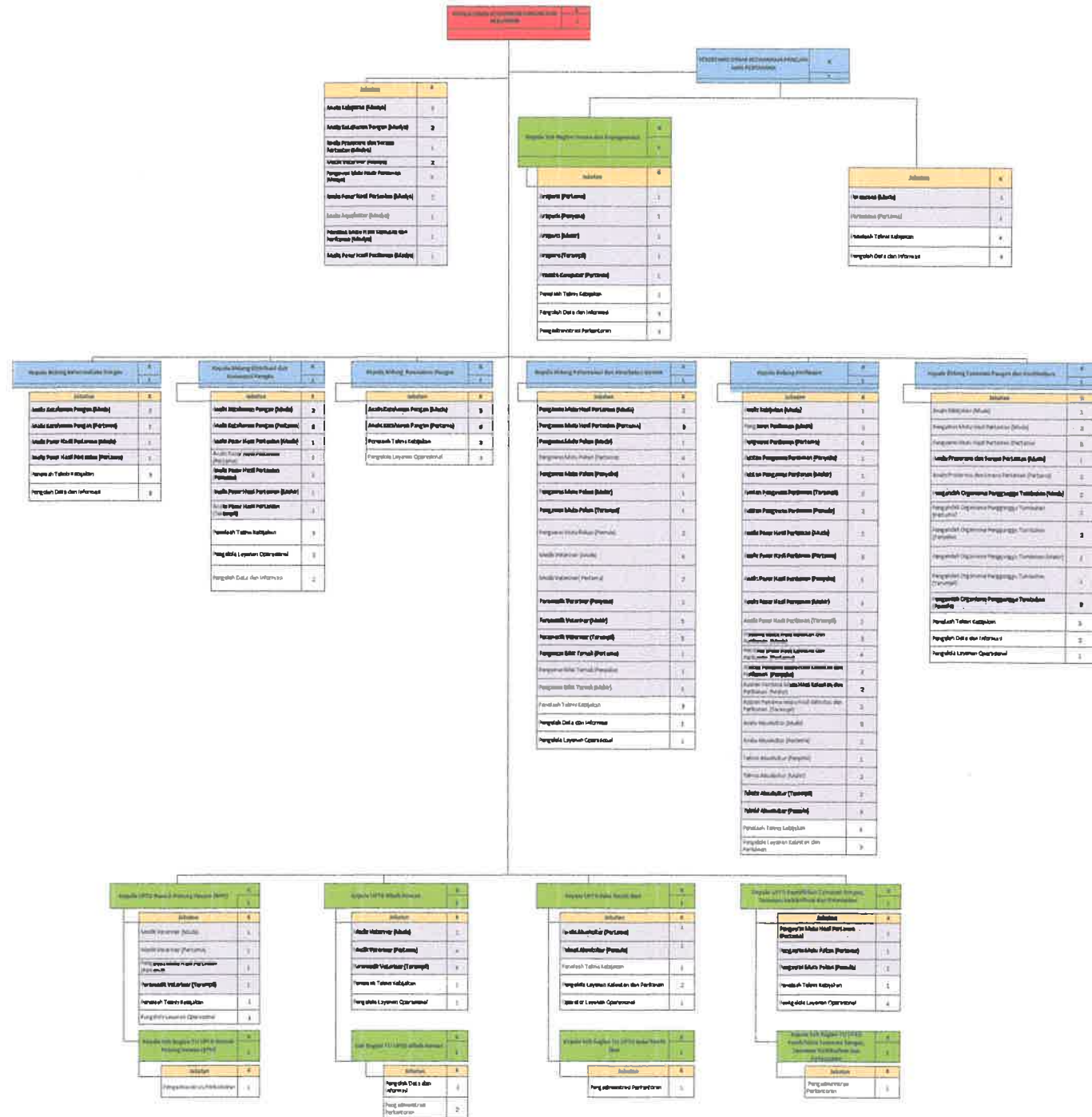
PETA JABATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



PETA JABATAN DINAS SOSIAL



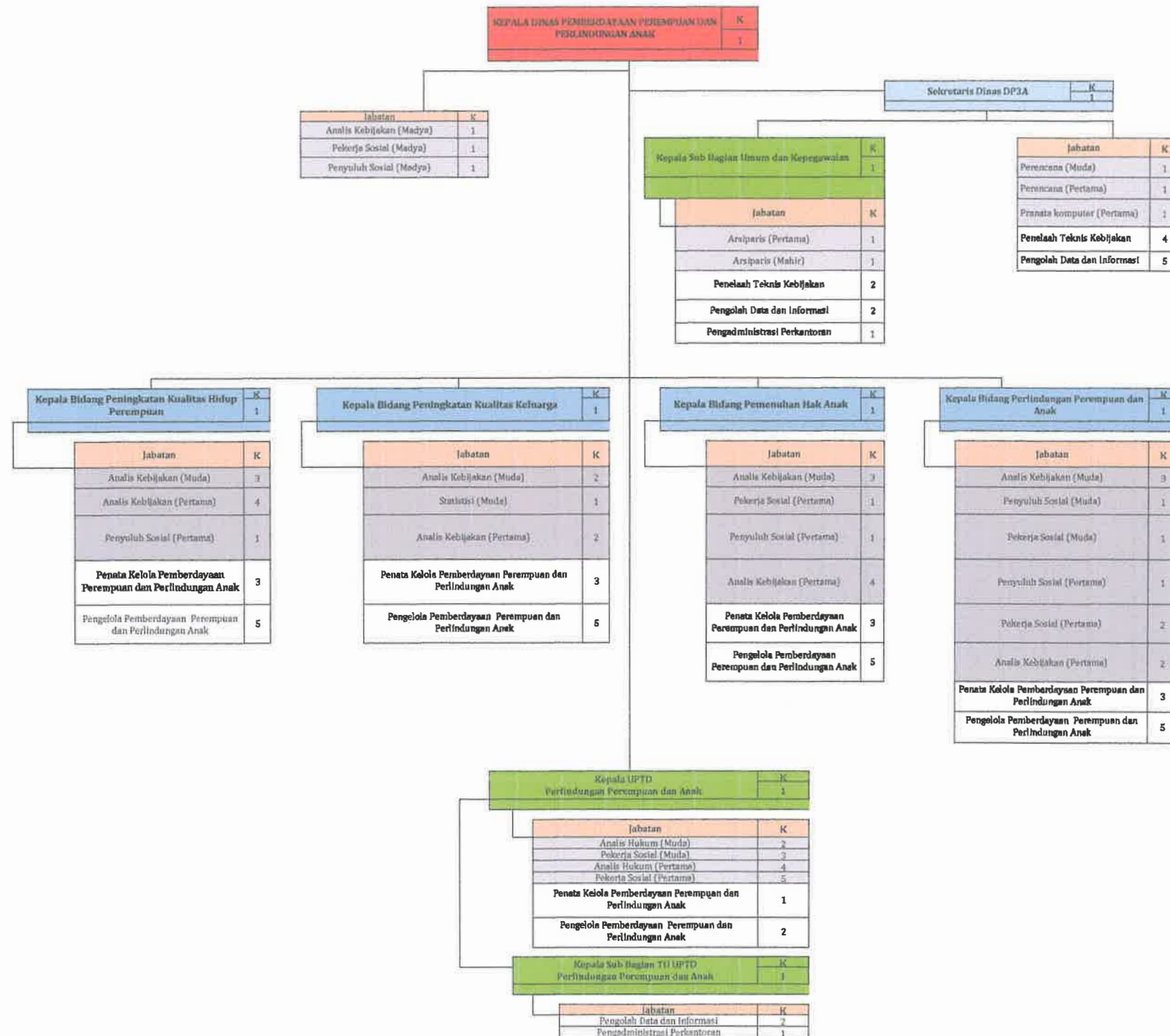
PETA JABATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



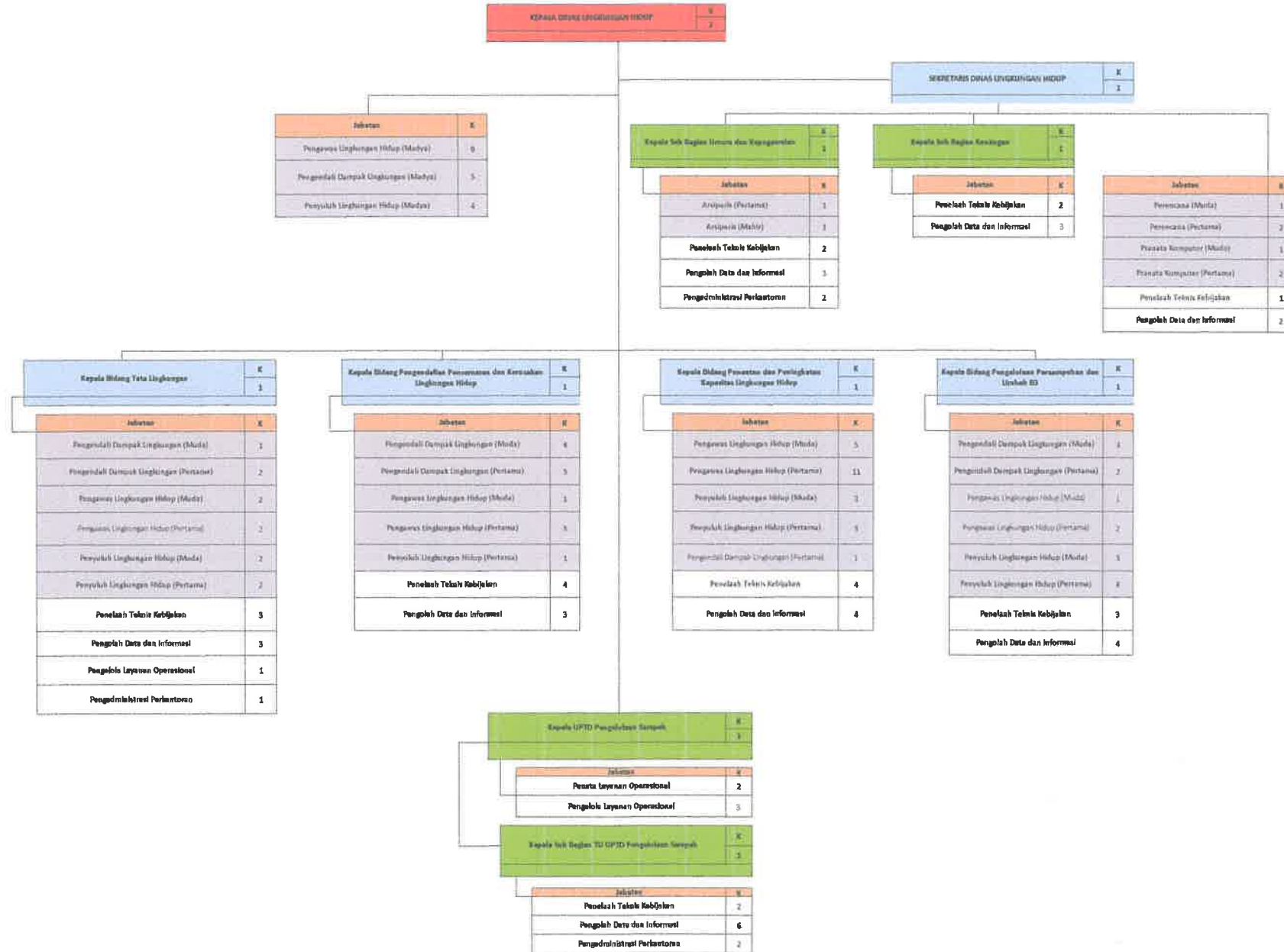
PETA JABATAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN



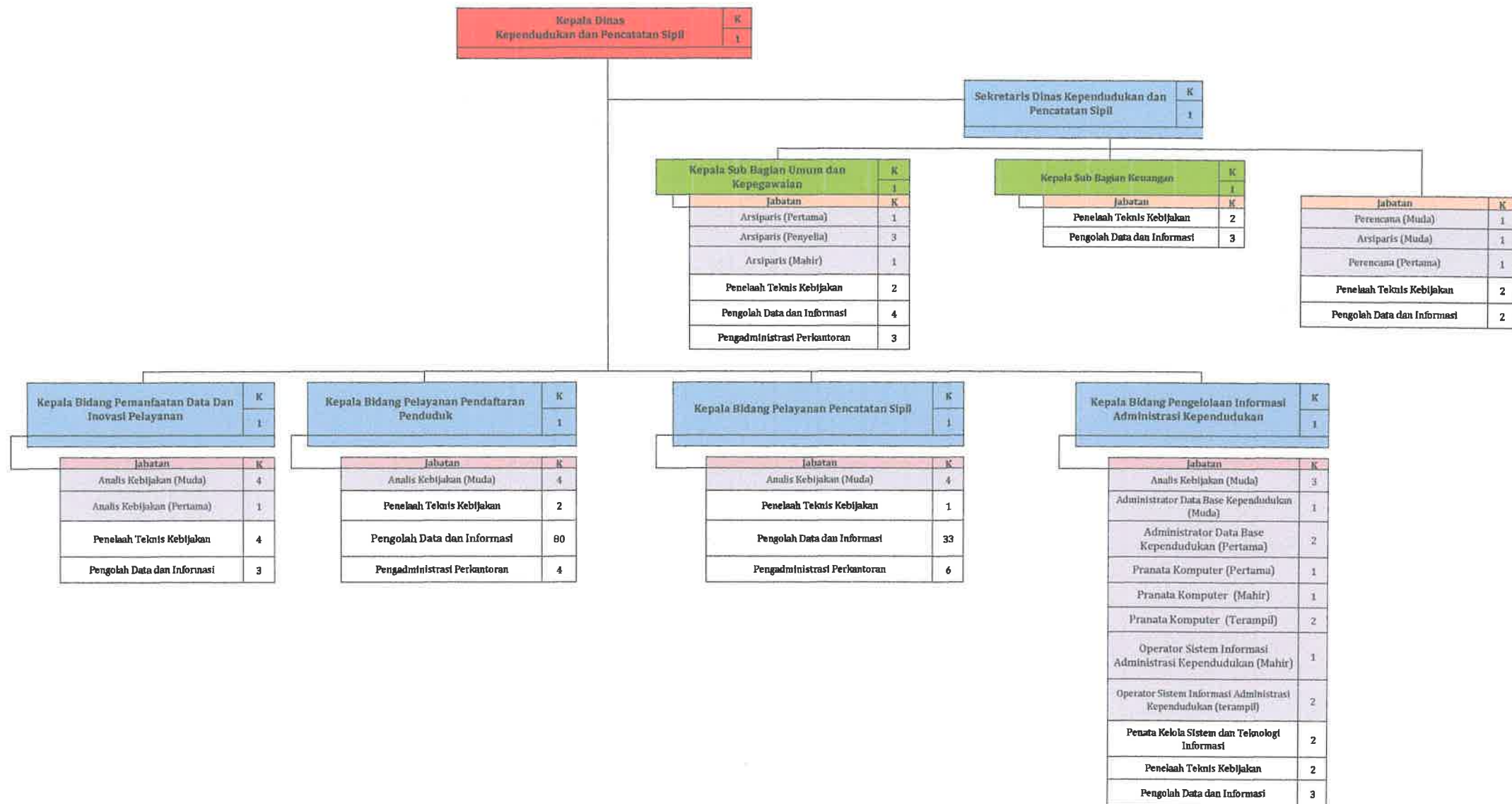
PETA JABATAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



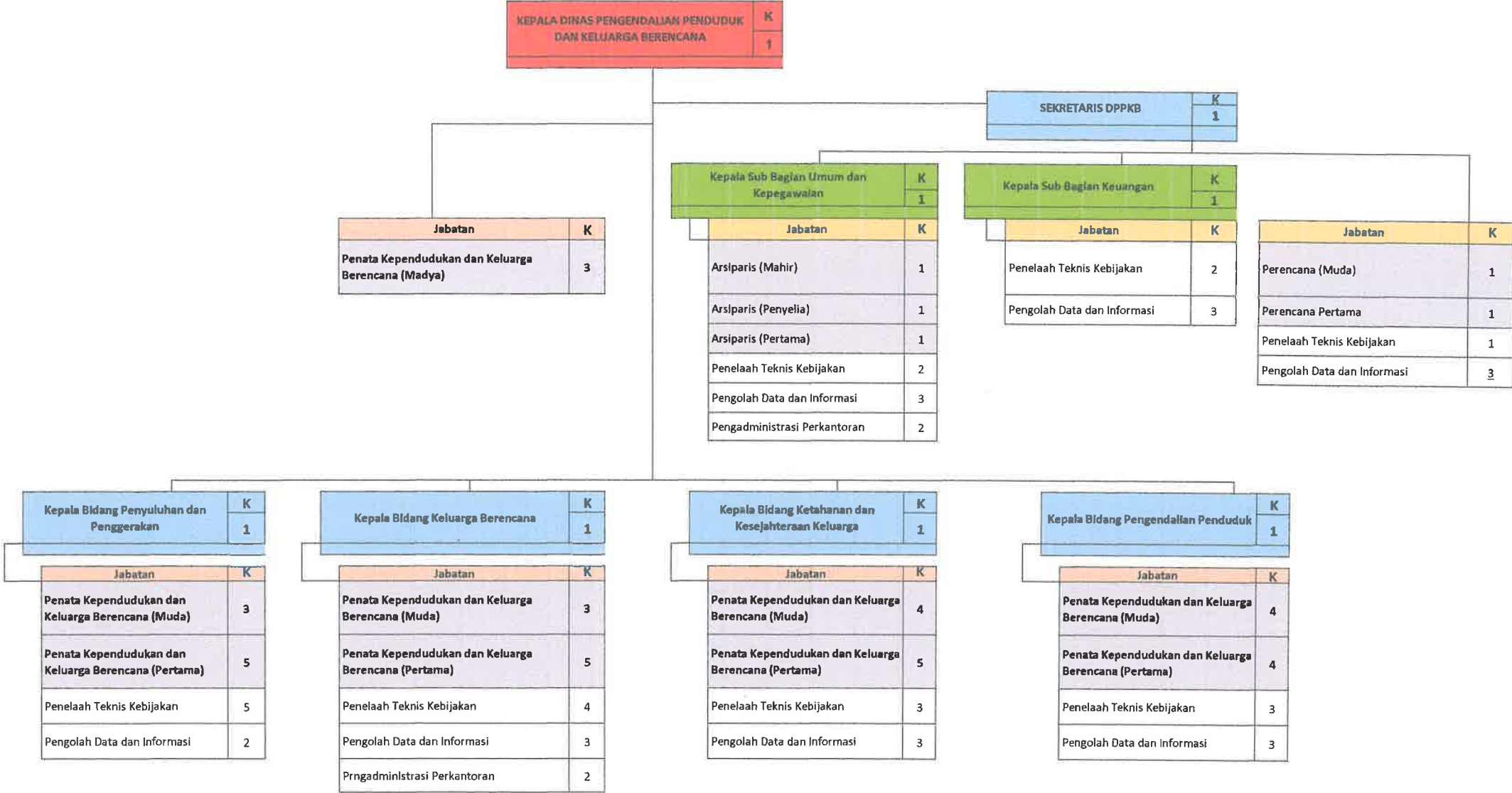
PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG



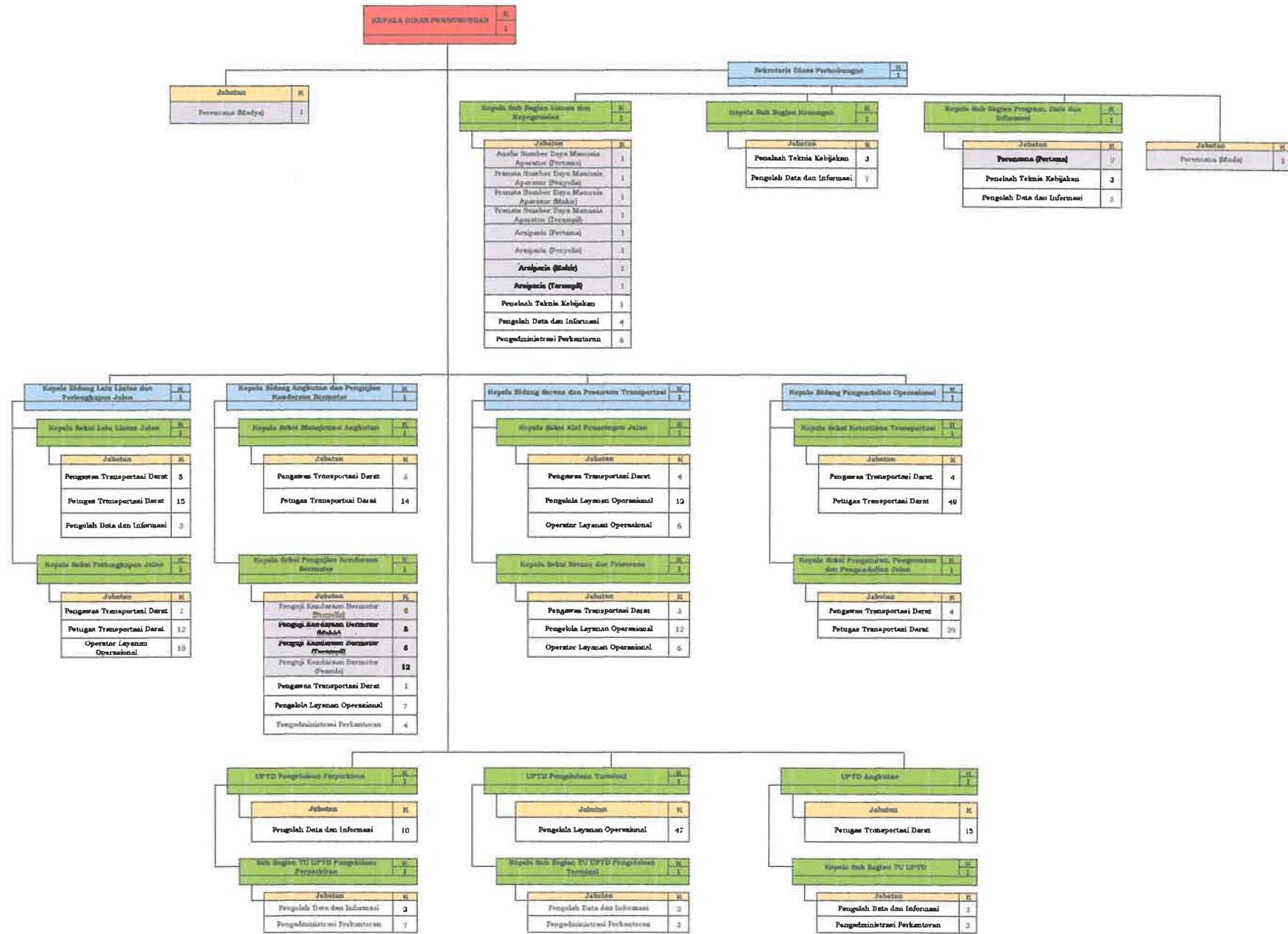
PETA JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



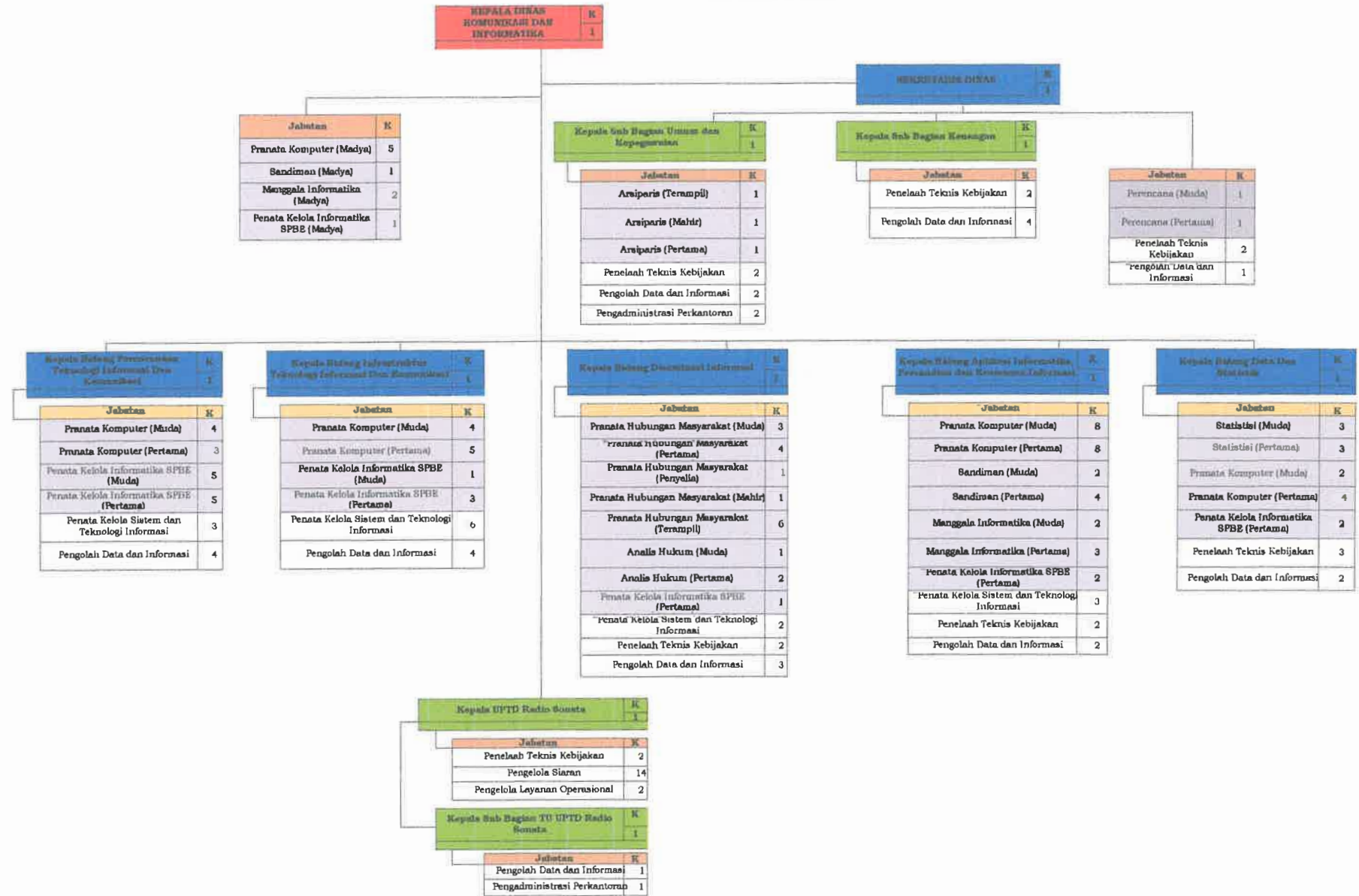
PETA JABATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



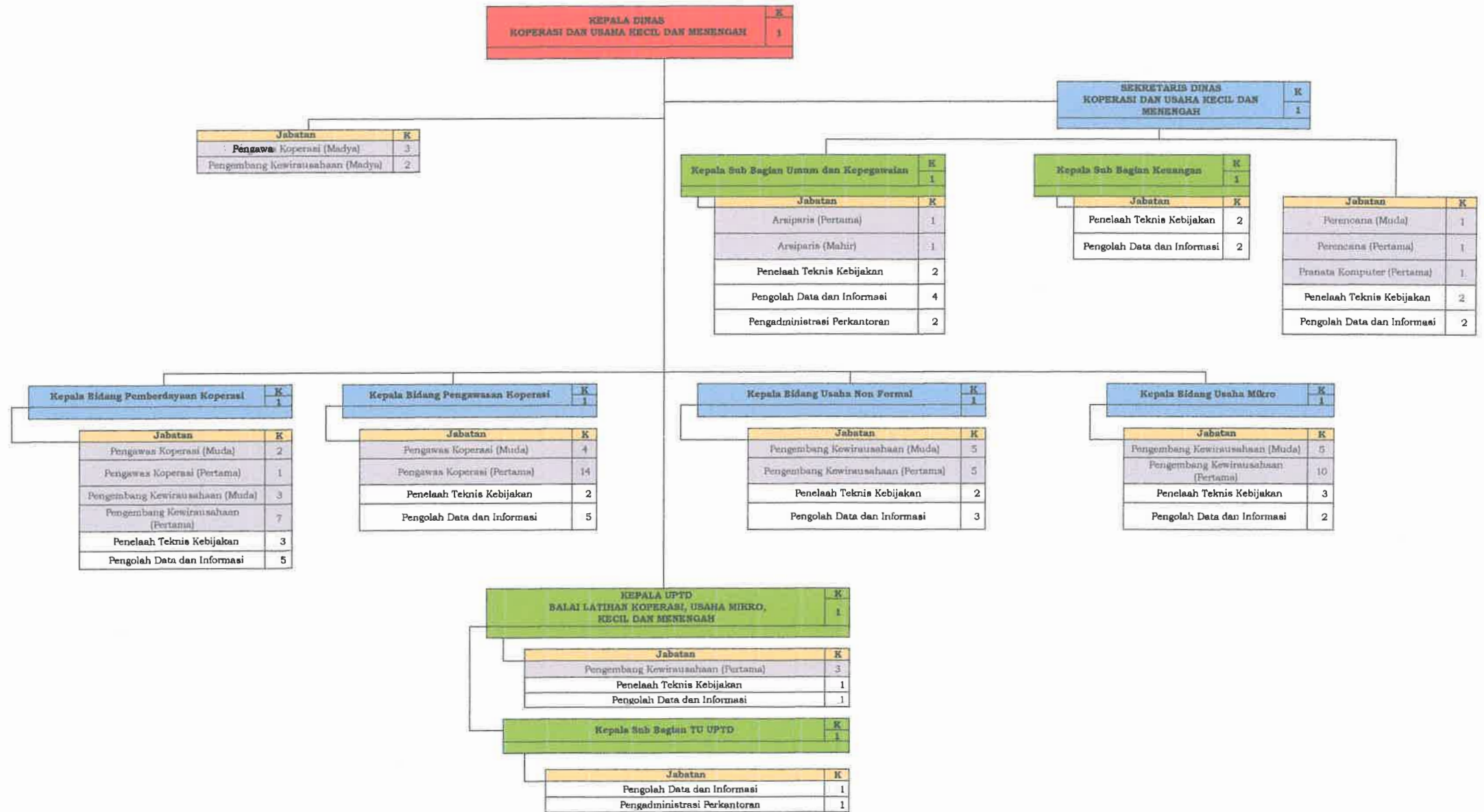
PETA JABATAN DINAS PERHUBUNGAN



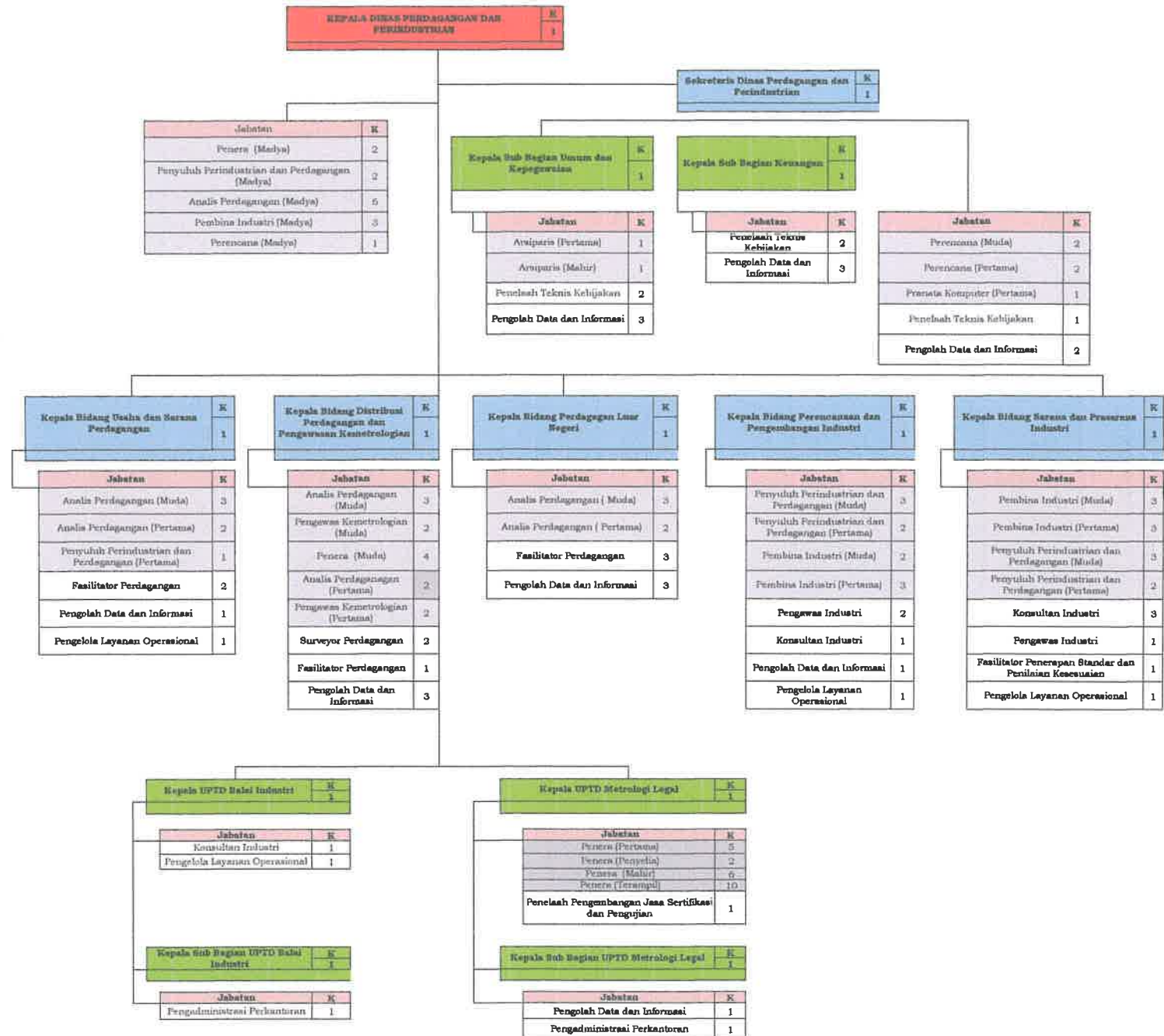
PETA JABATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



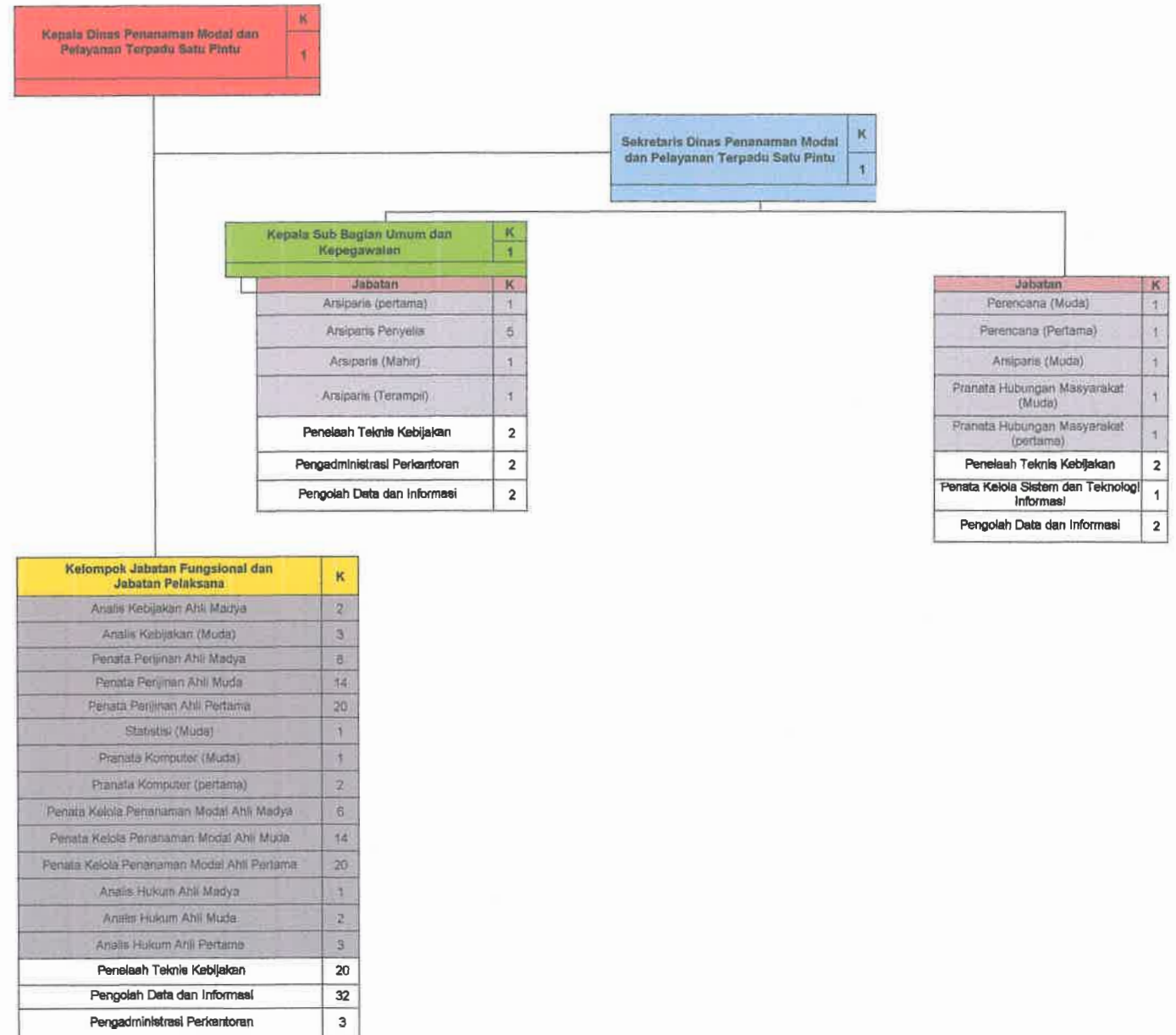
PETA JABATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



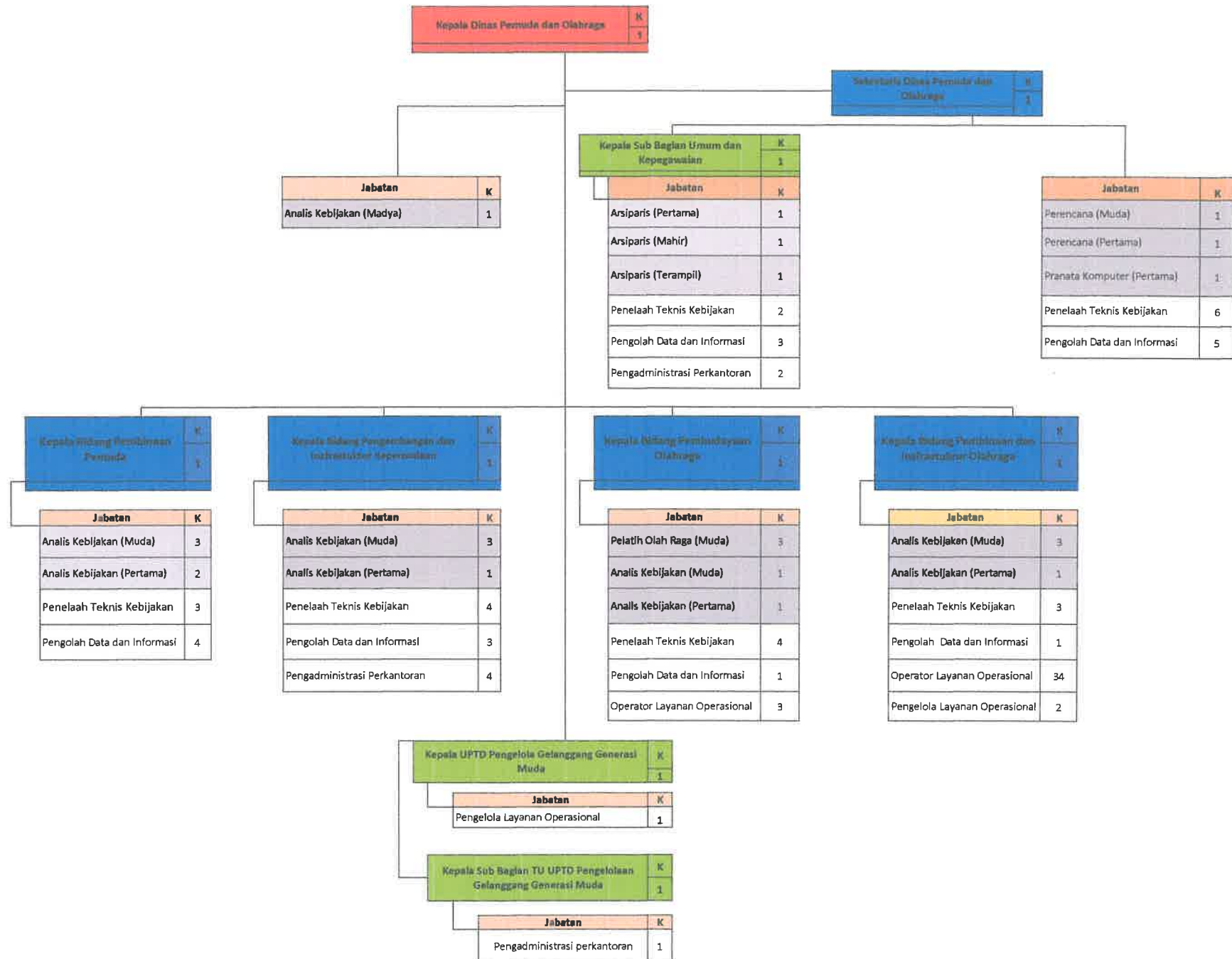
PETA JABATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



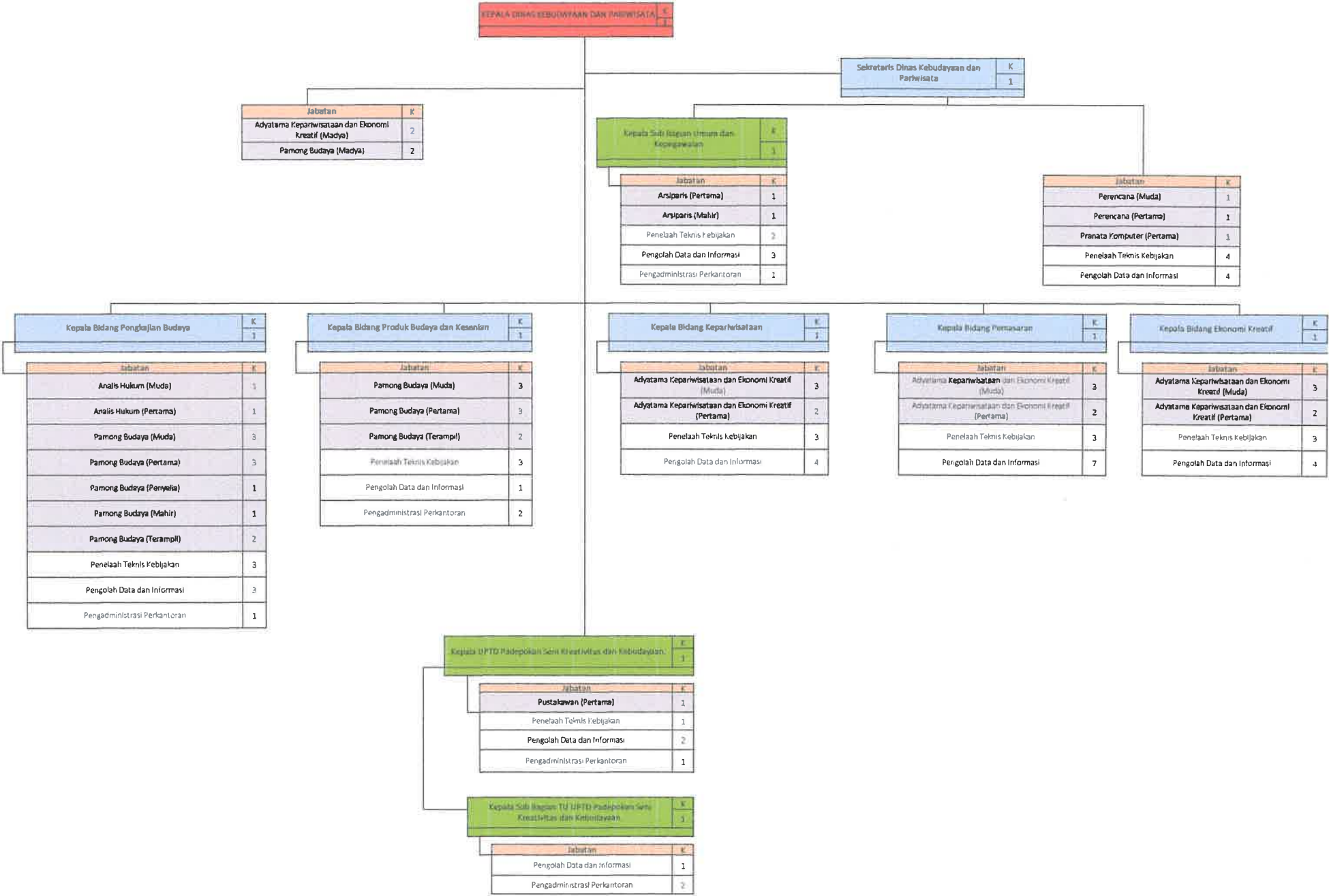
PETA JABATAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



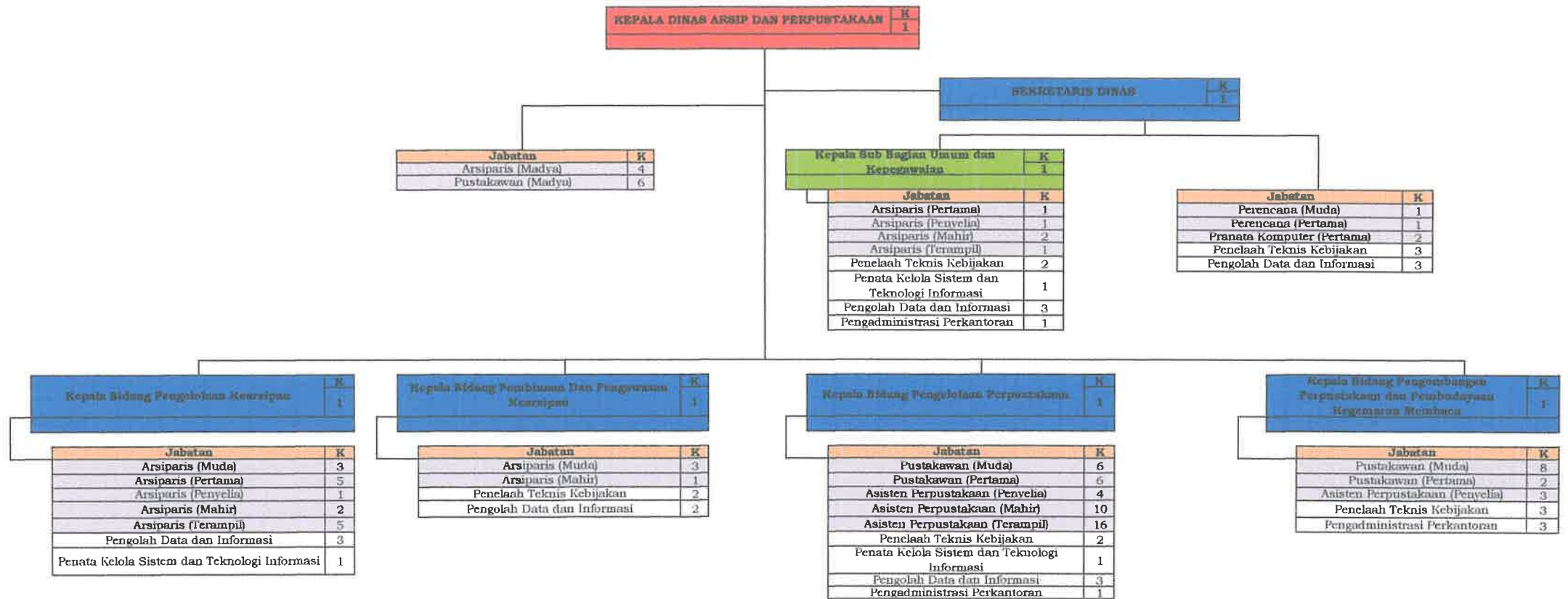
PETA JABATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



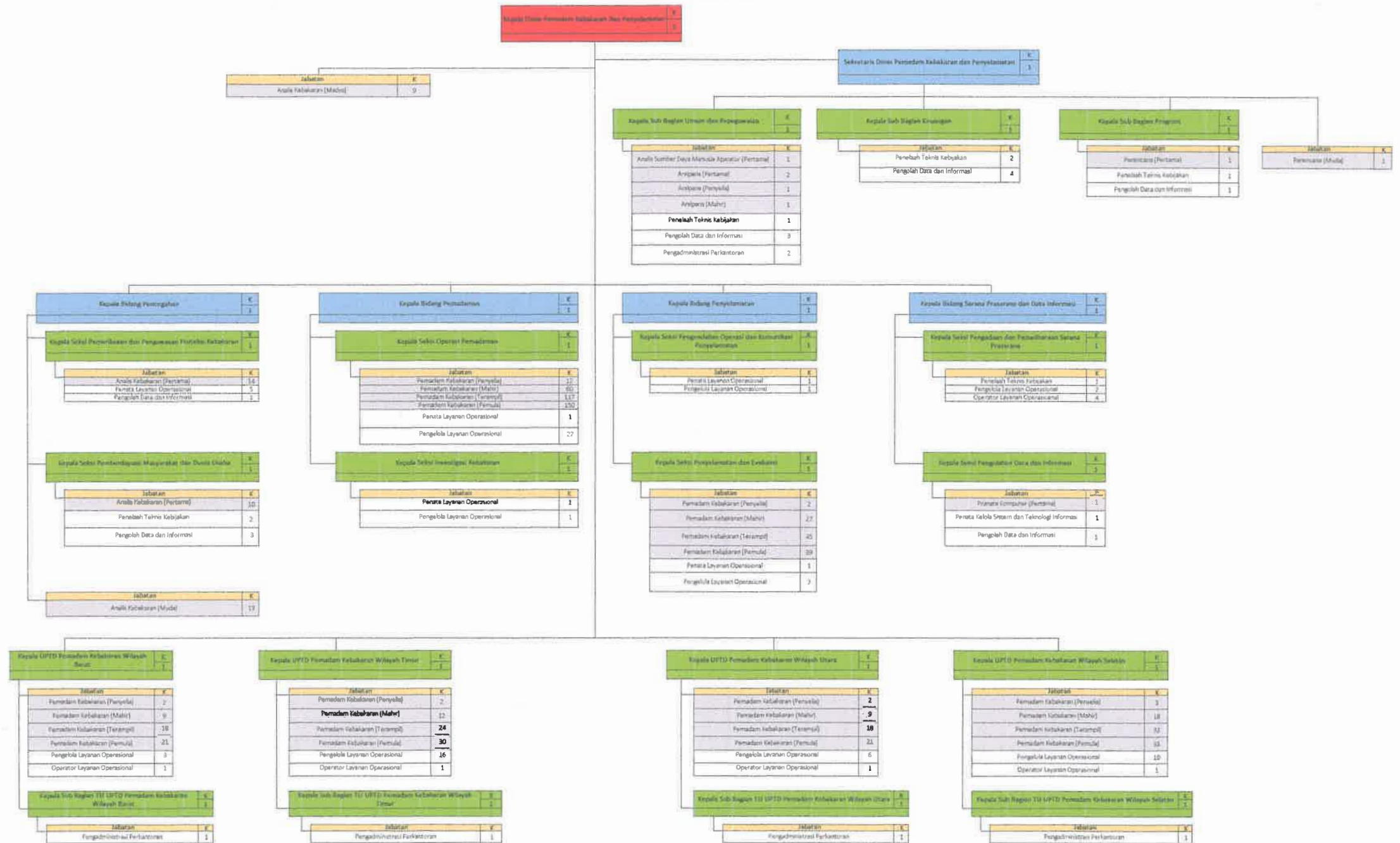
PETA JABATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



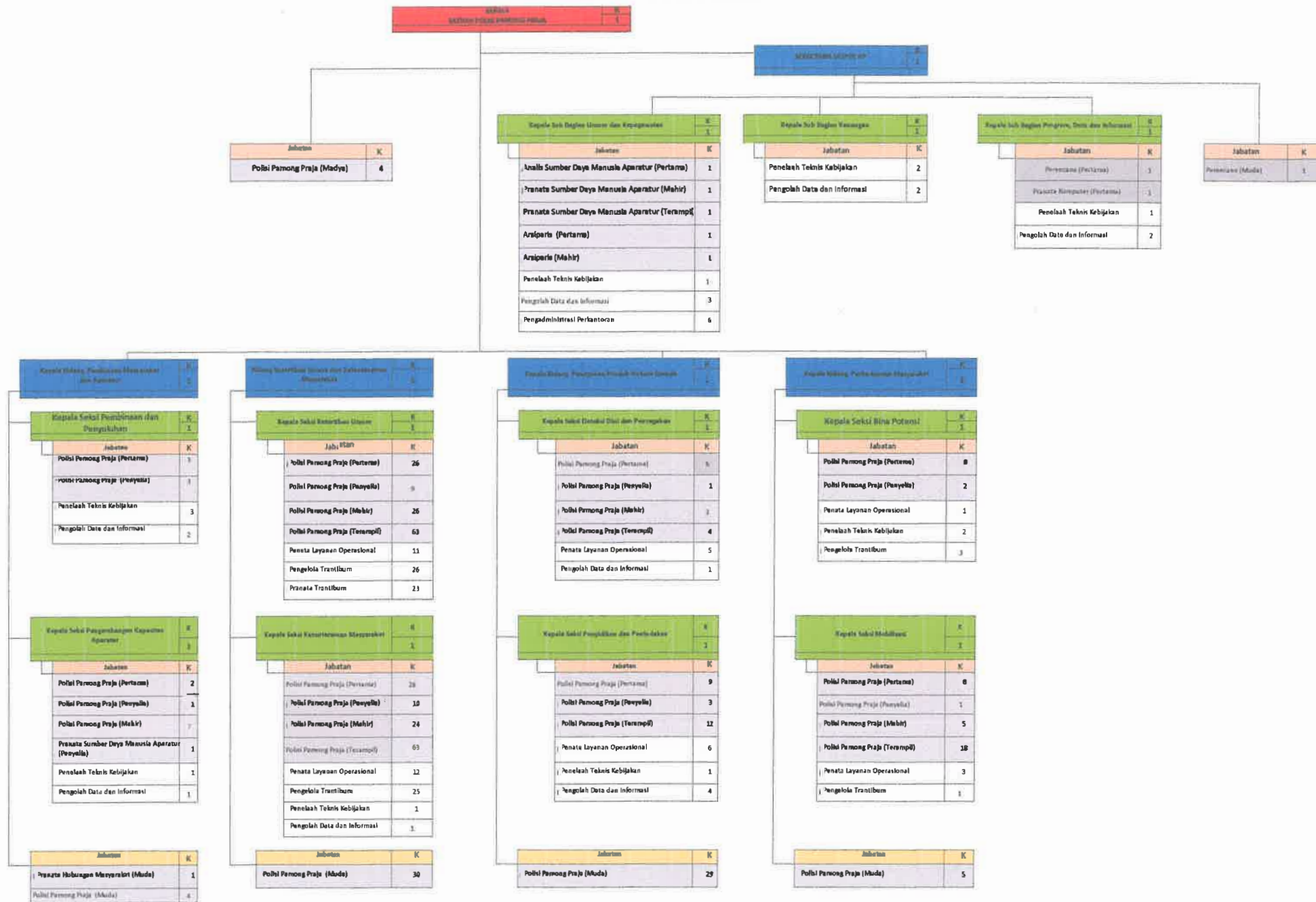
PETA JABATAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN



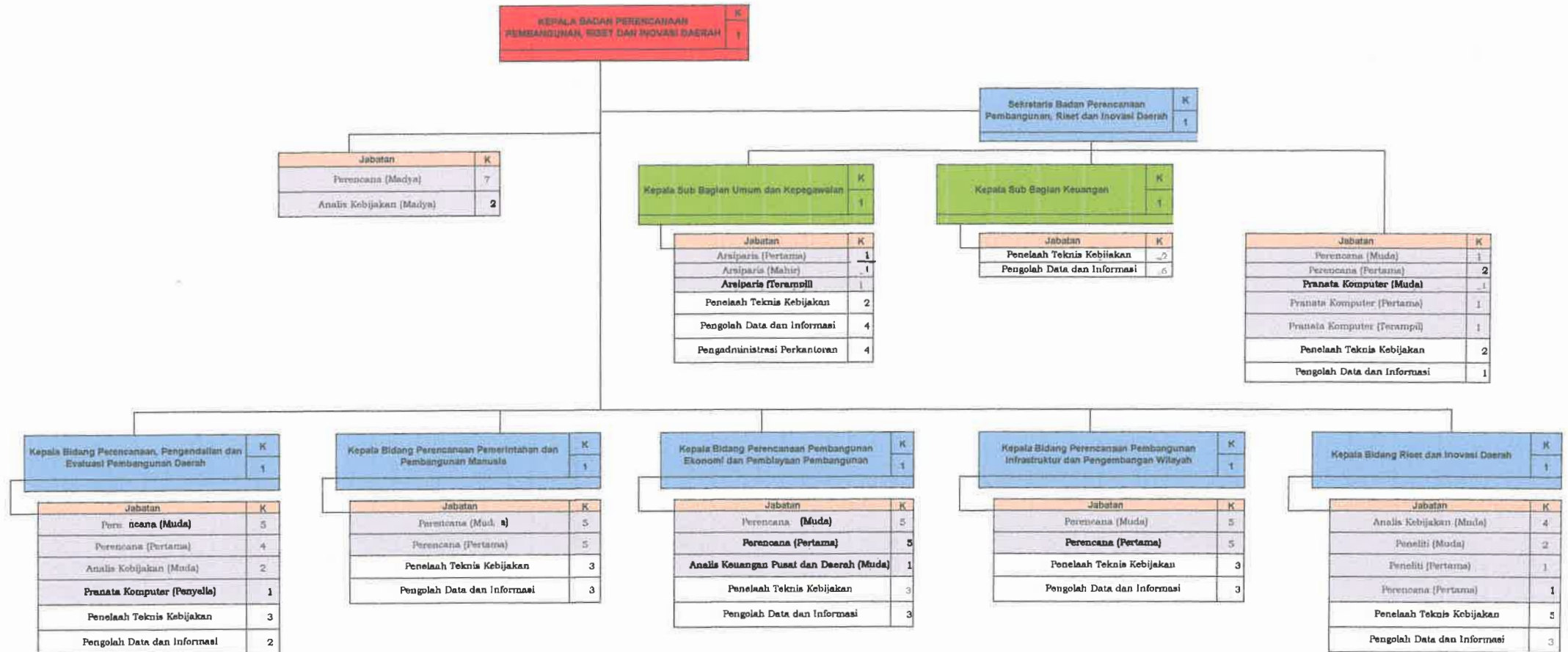
PETA JABATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



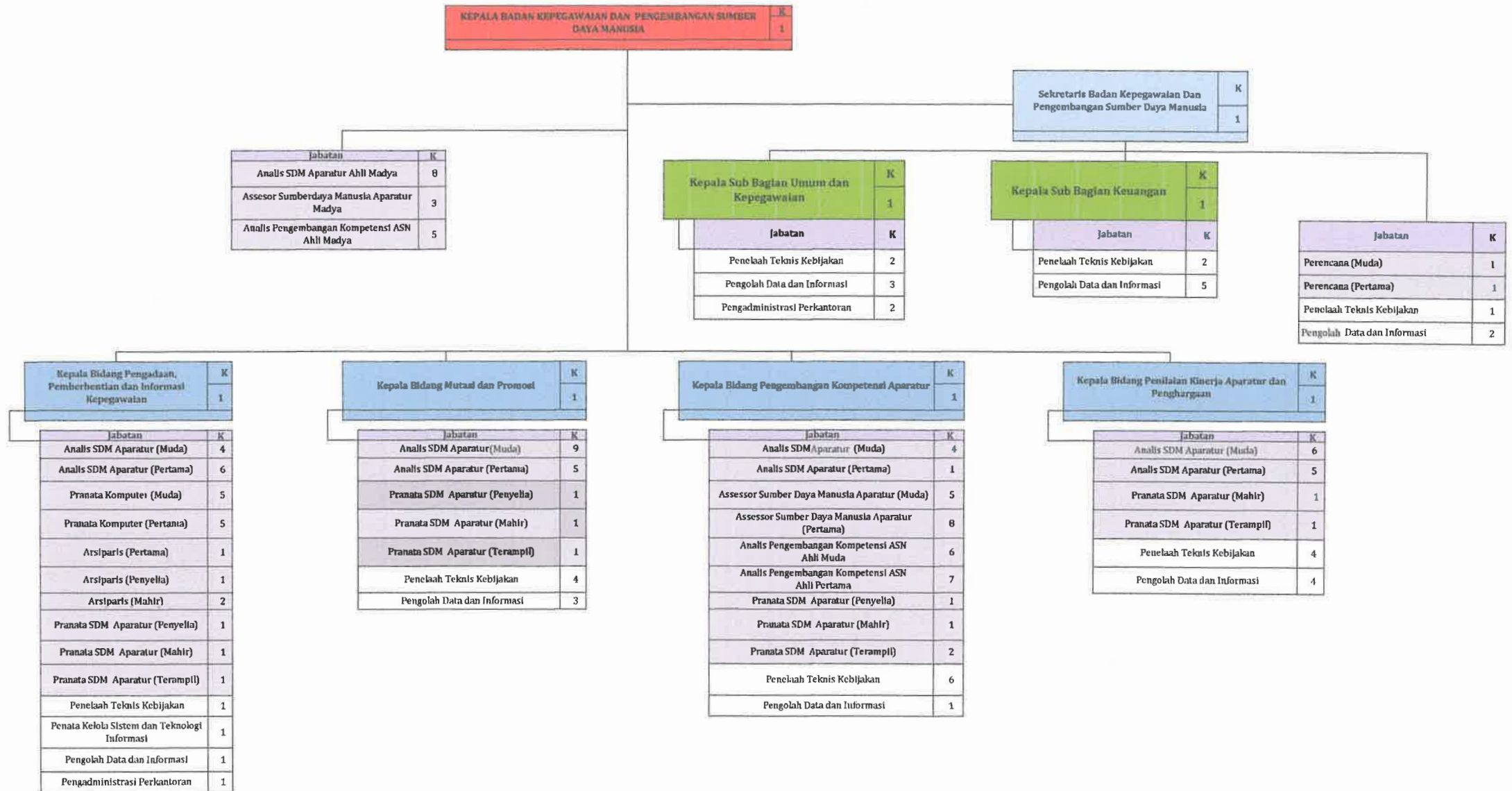
PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



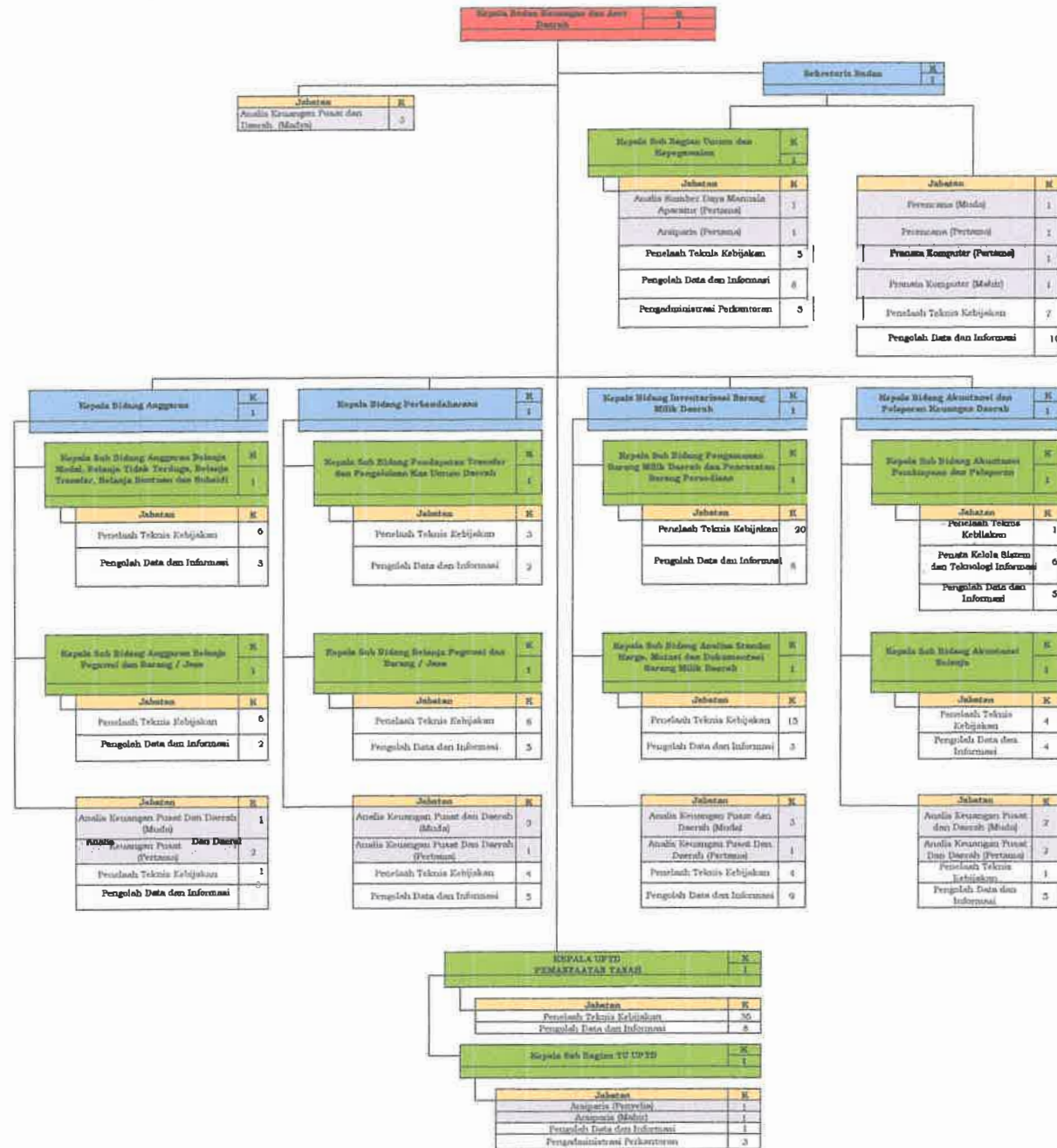
PETA JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

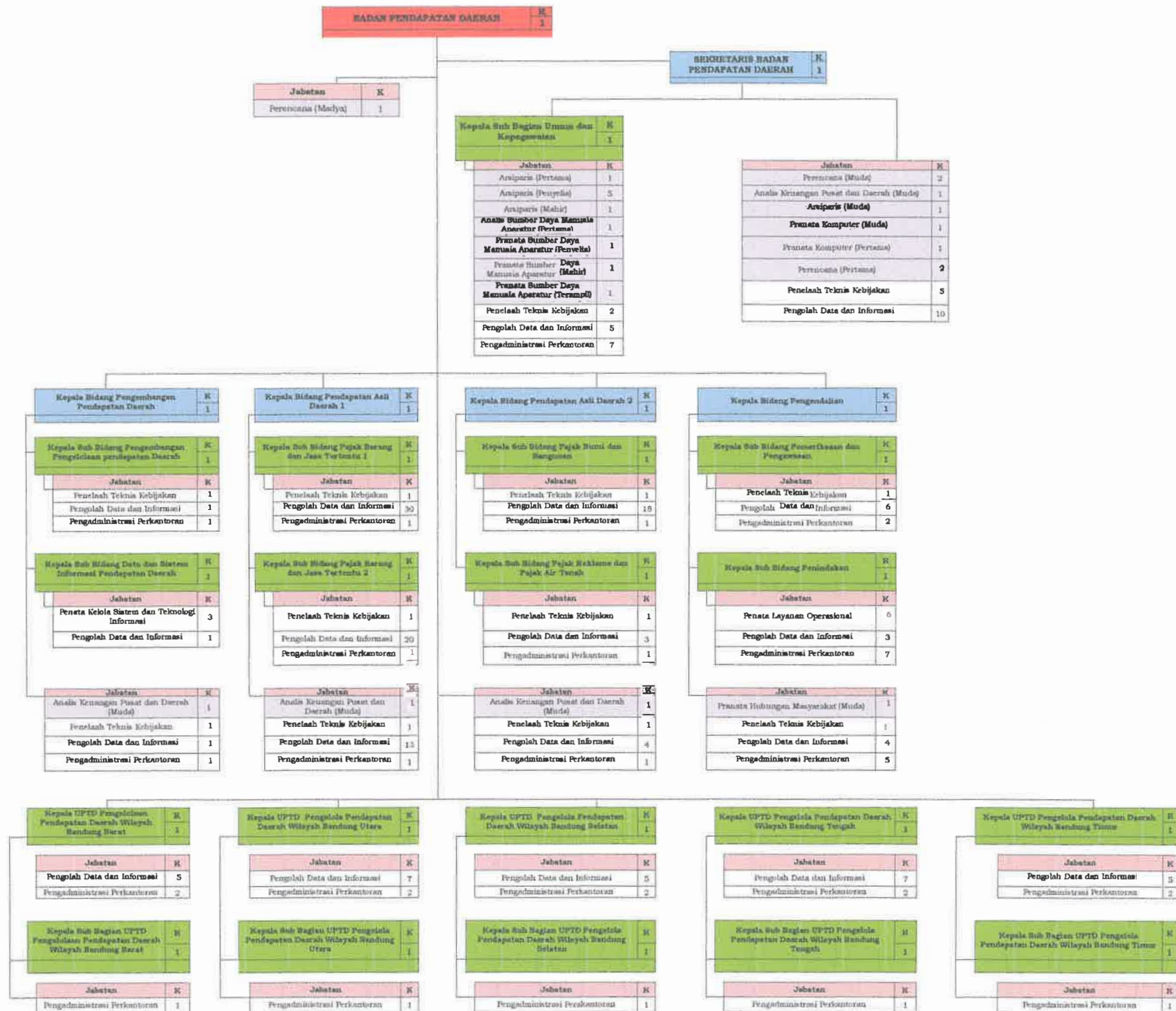


PETA JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

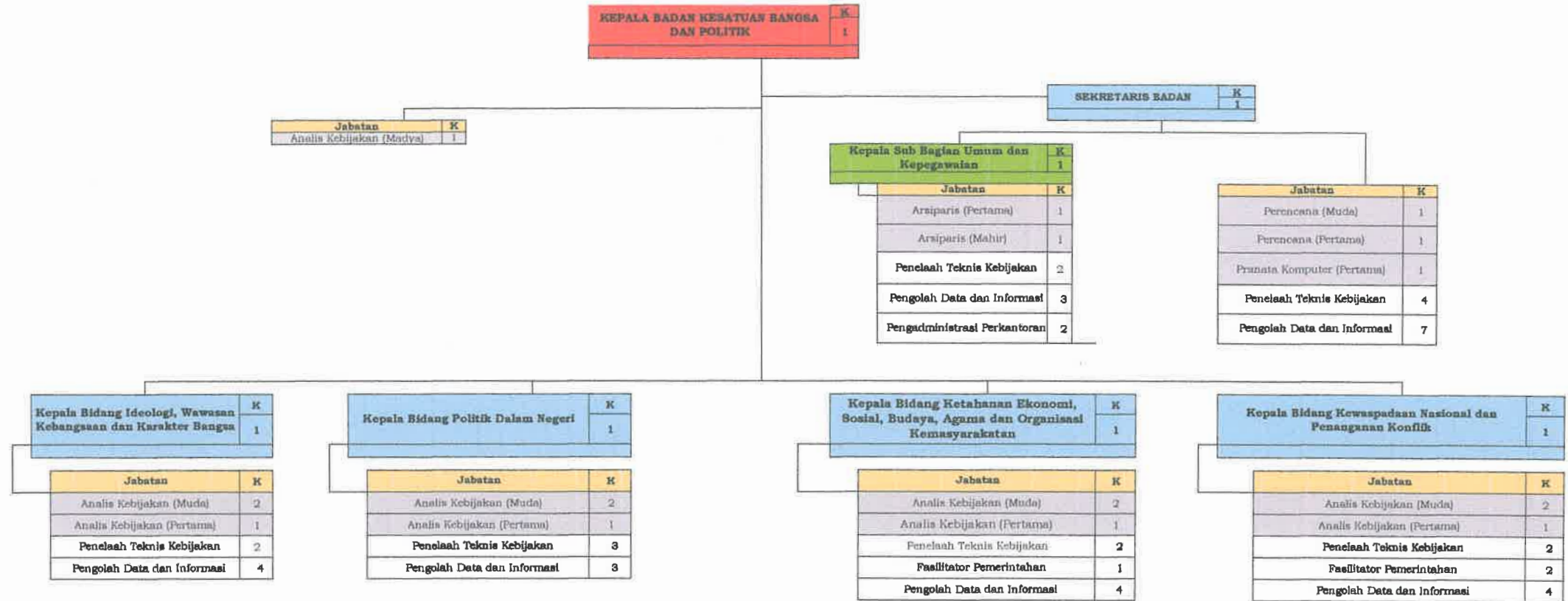


PETA JABATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH





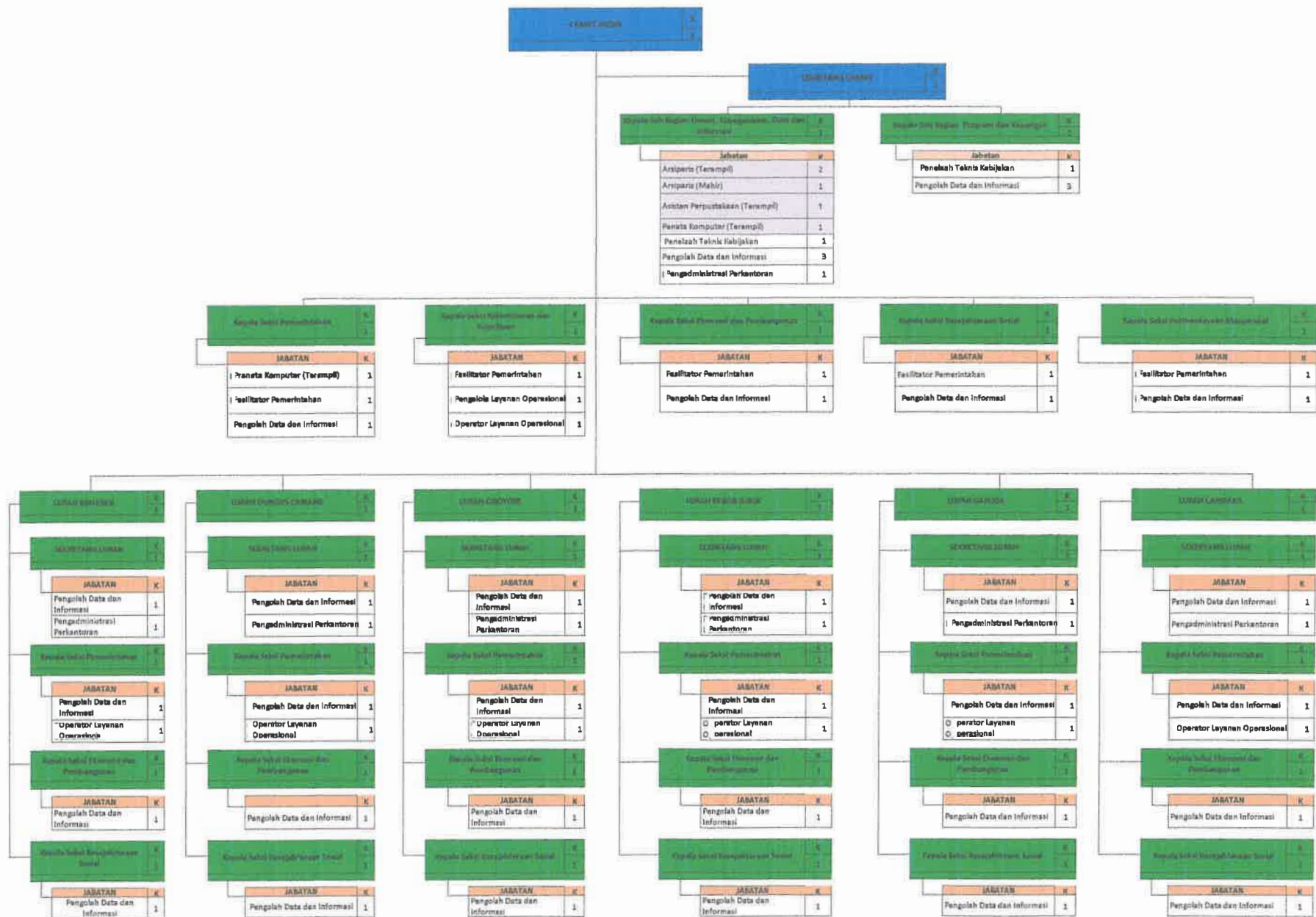
PETA JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



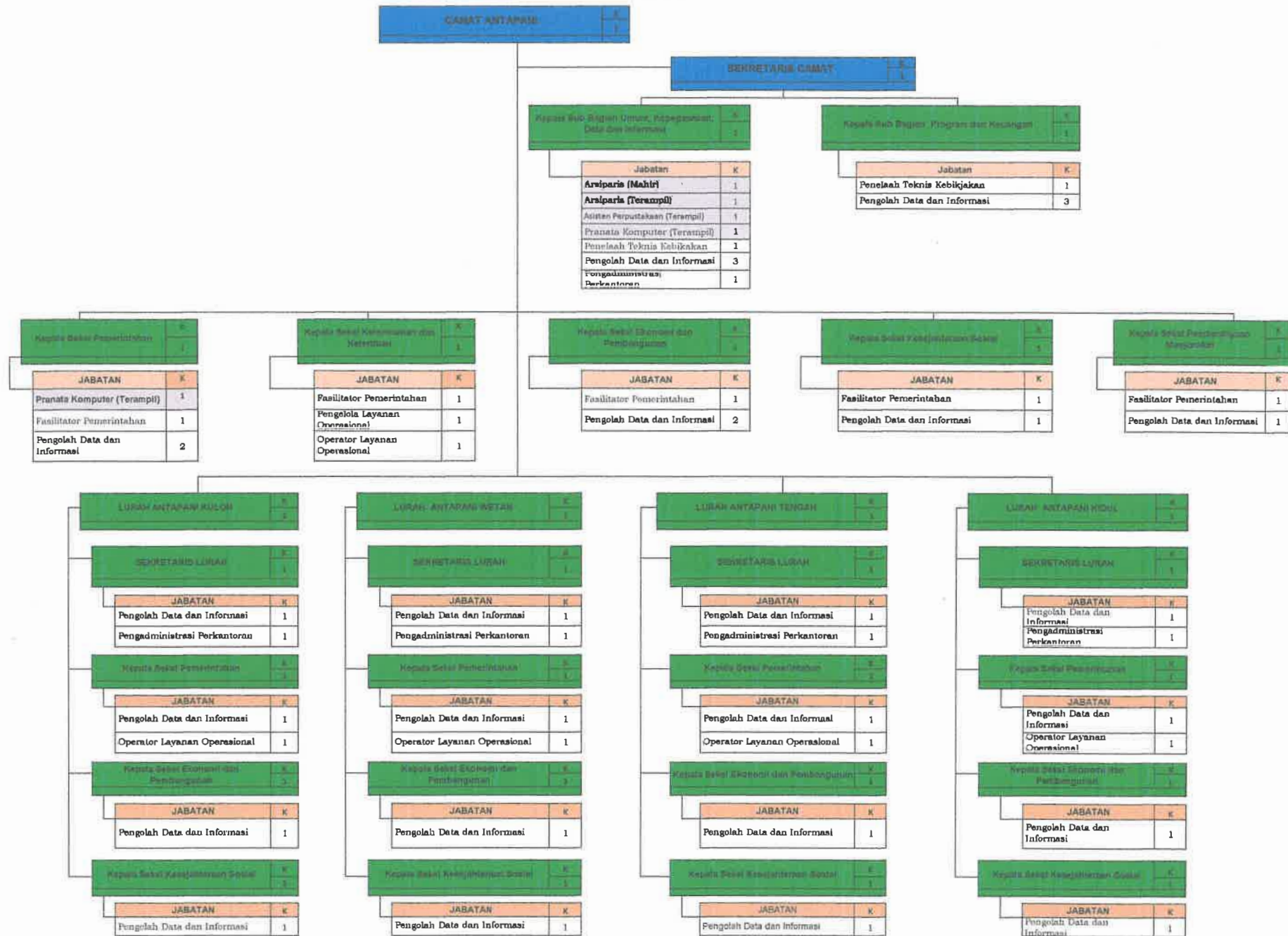
PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



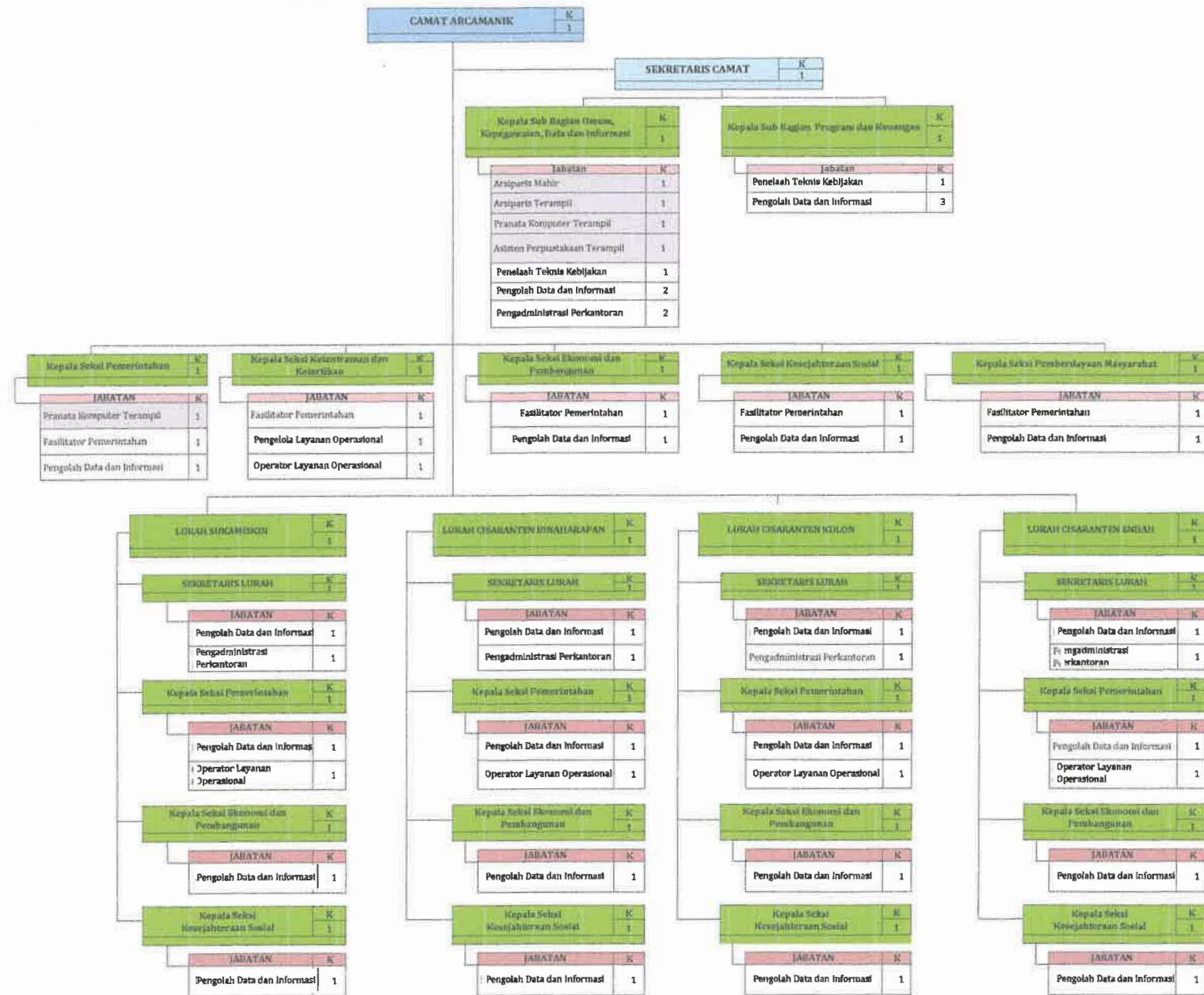
PETA JABATAN KECAMATAN ANDIR



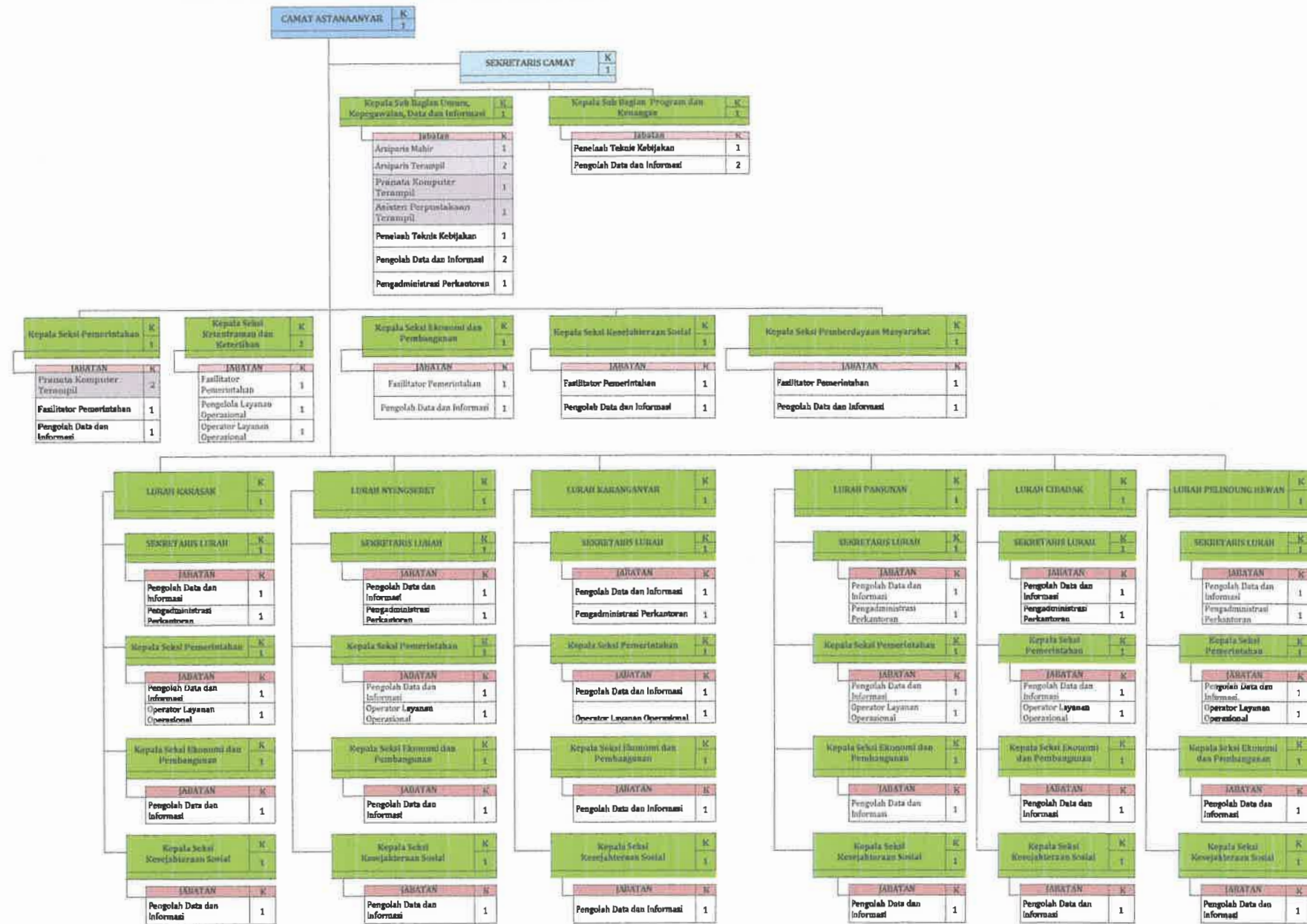
PETA JABATAN KECAMATAN ANTAPANI



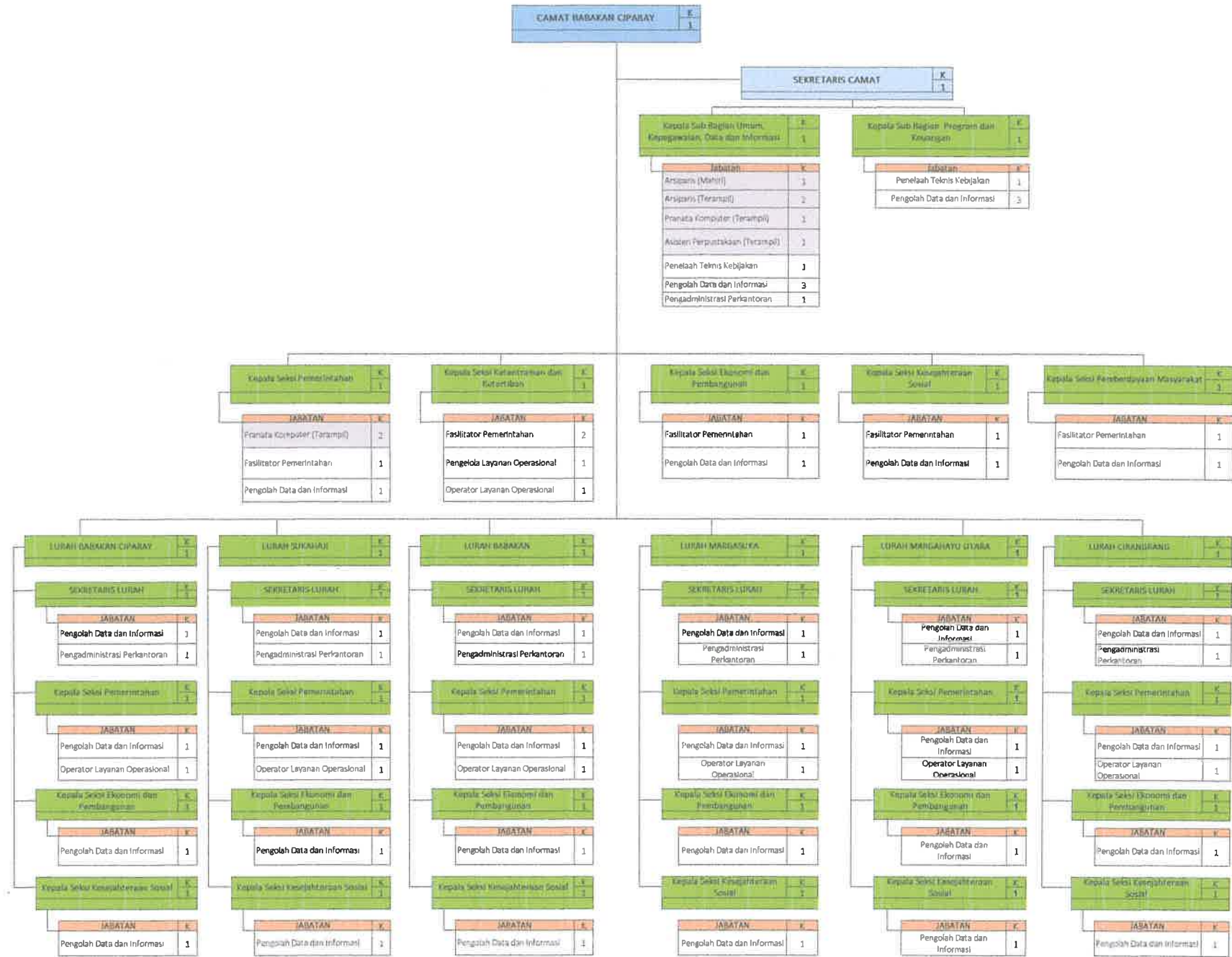
PETA JABATAN KECAMATAN ARCAMANIK



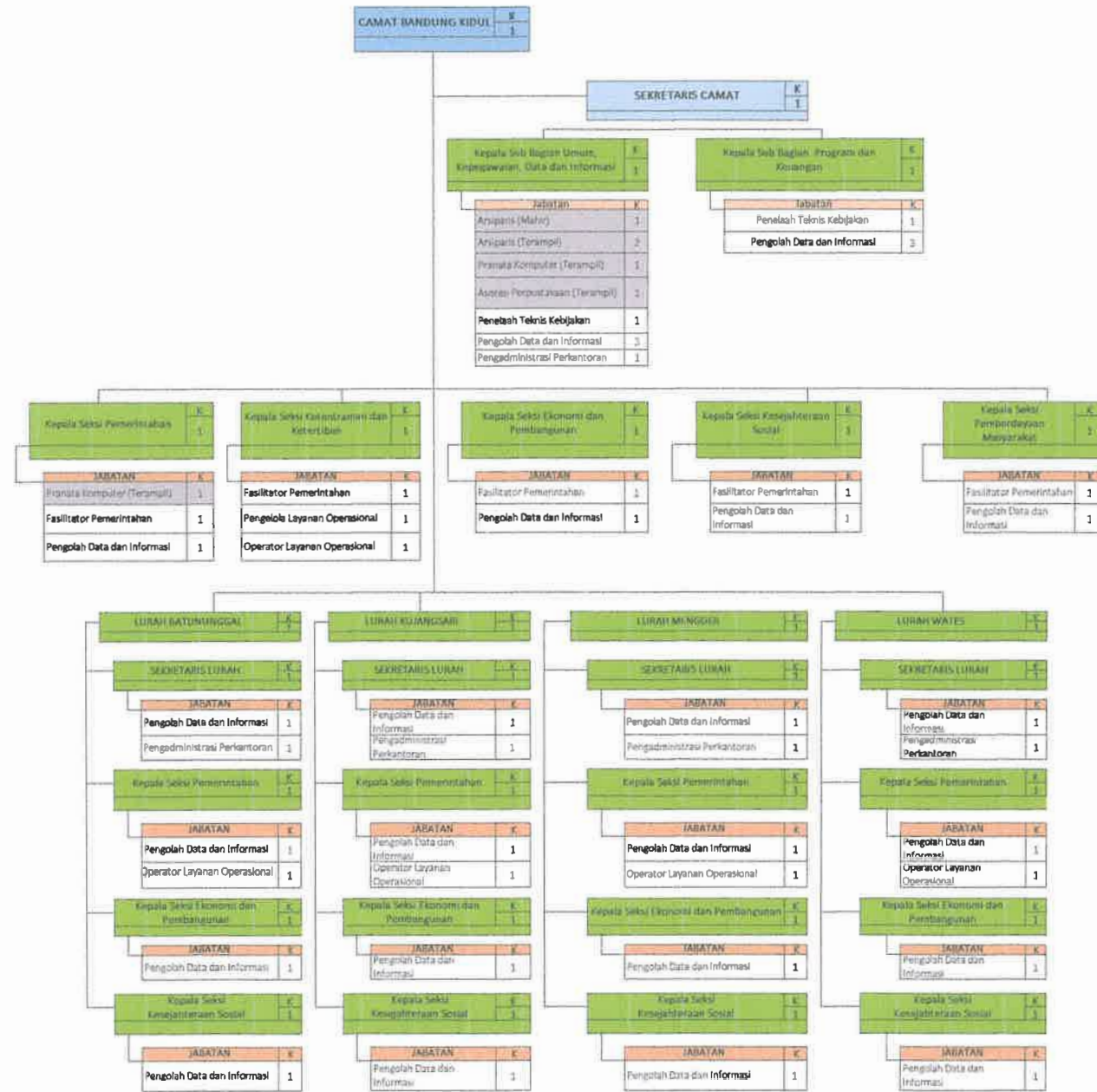
PETA JABATAN KECAMATAN ASTANA ANYAR



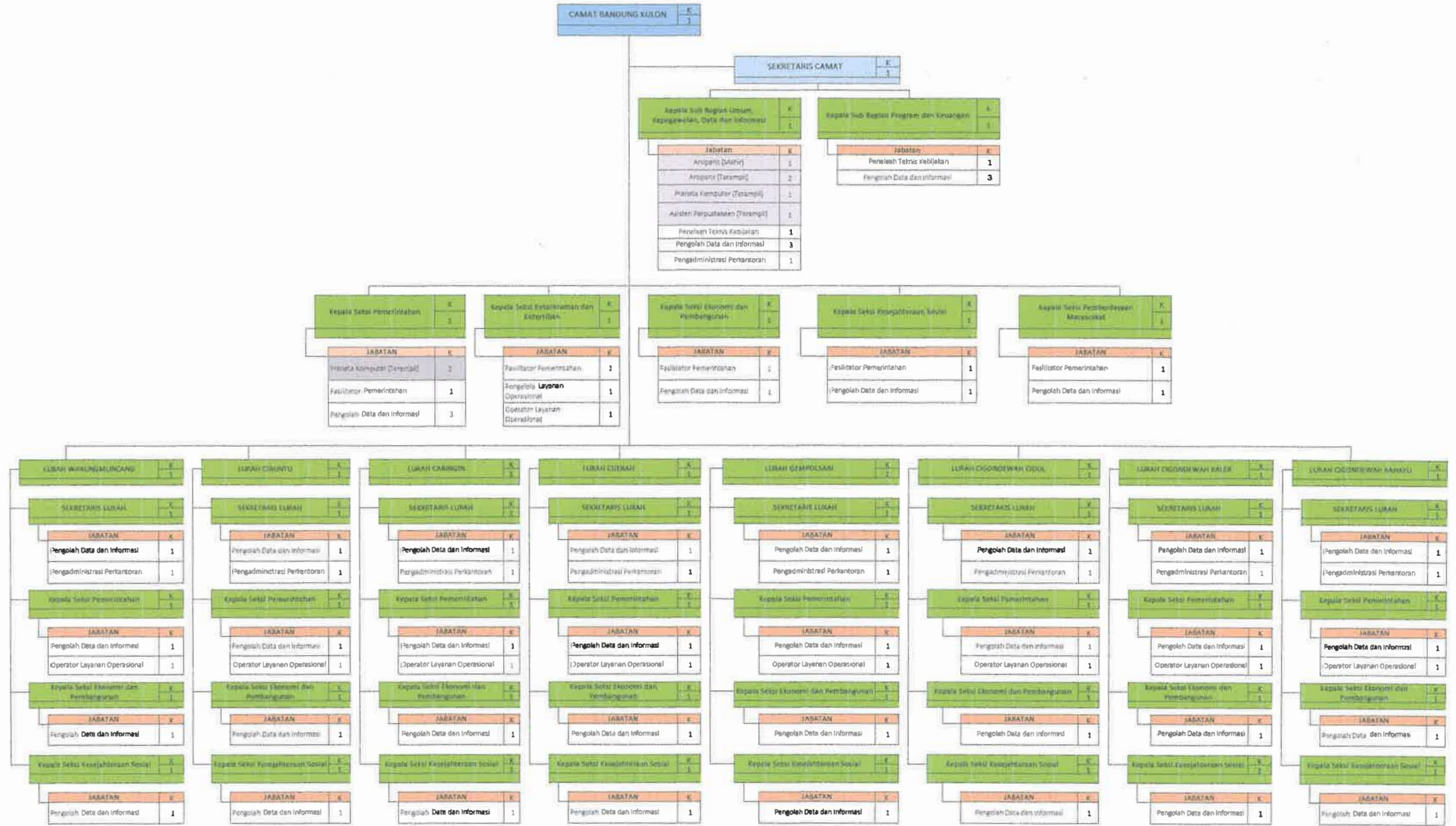
PETA JABATAN KECAMATAN BABAKAN CIPARAY



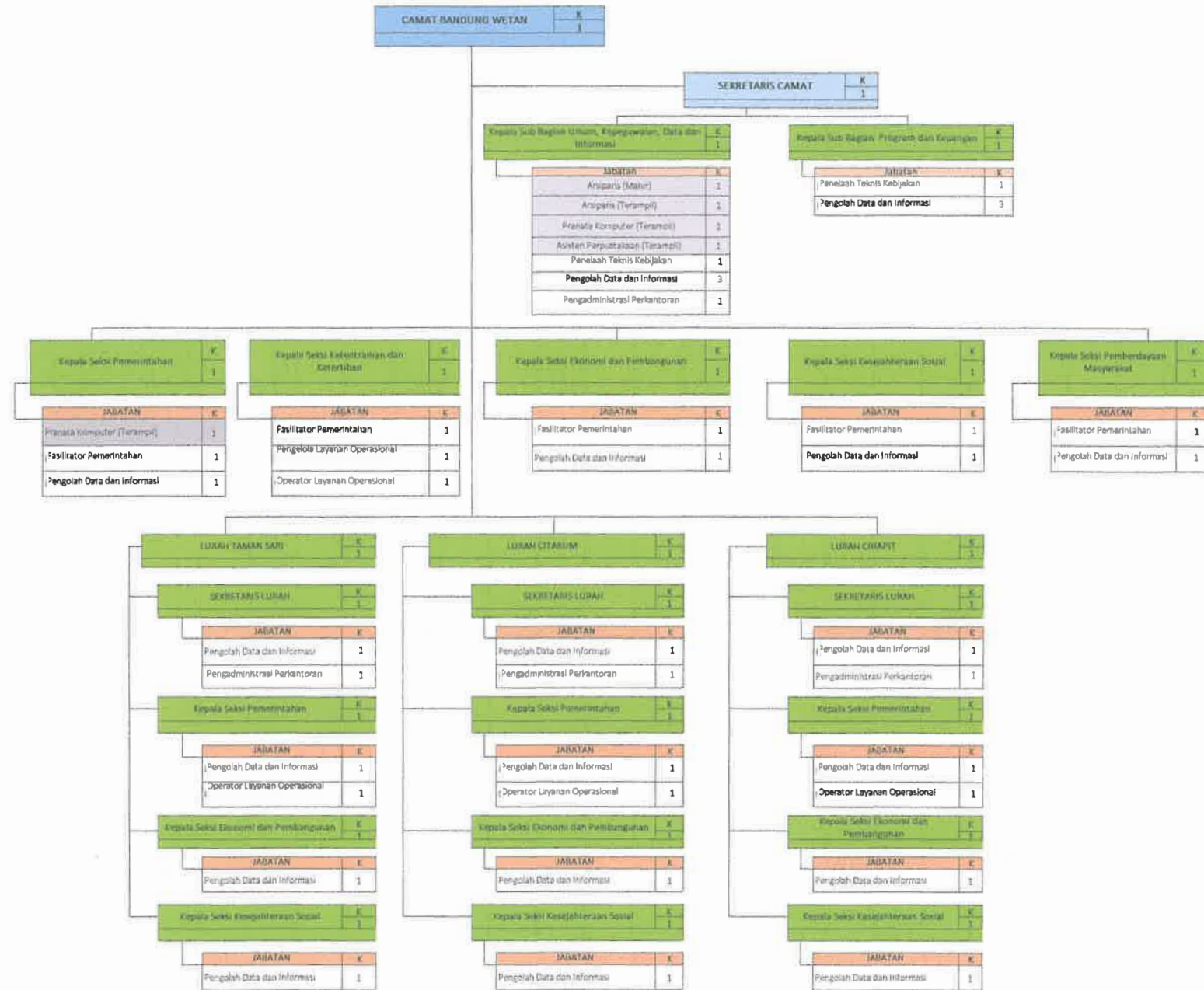
PETA JABATAN KECAMATAN BANDUNG KIDUL



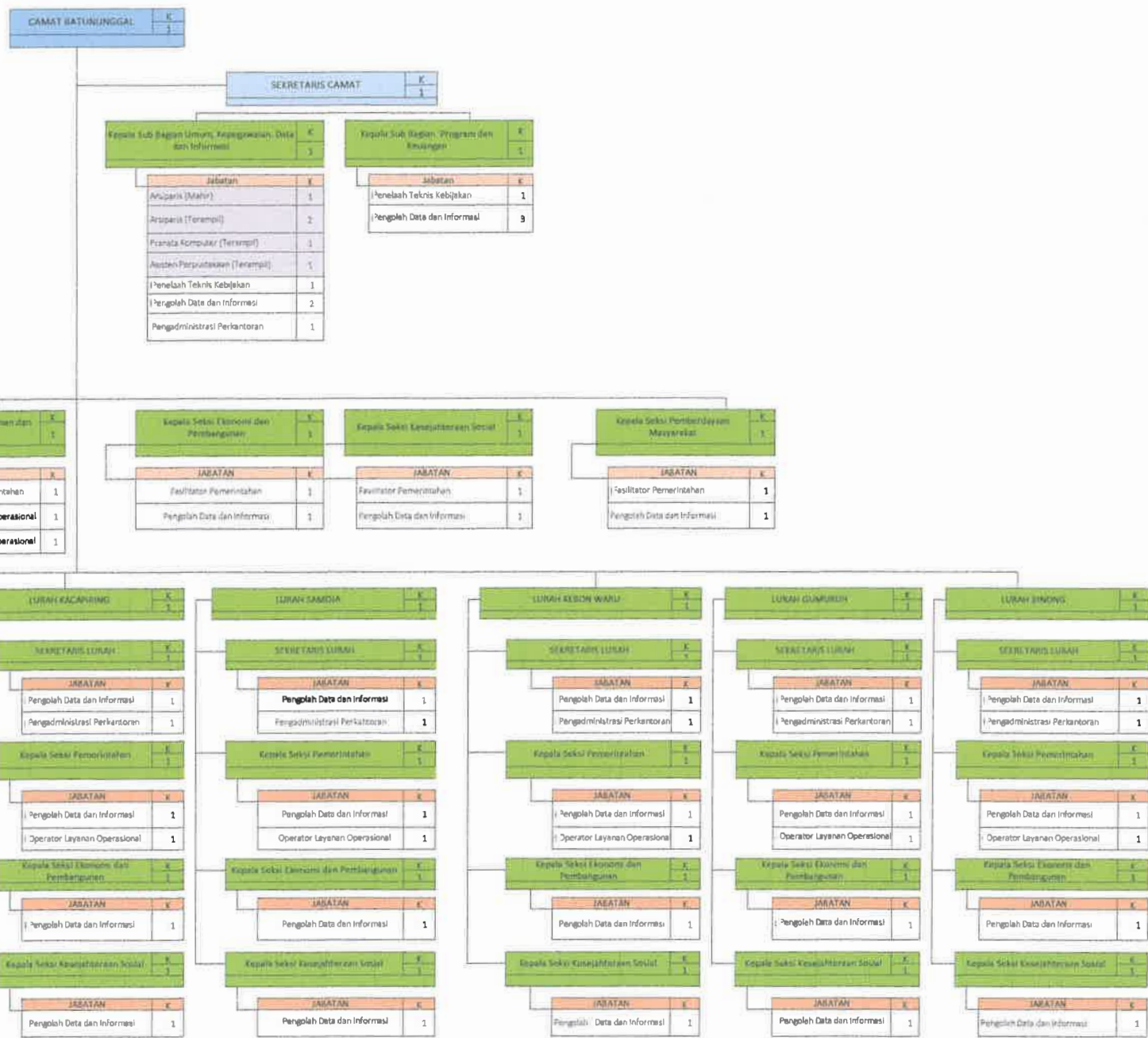
PETA JABATAN KECAMATAN BANDUNG KULON



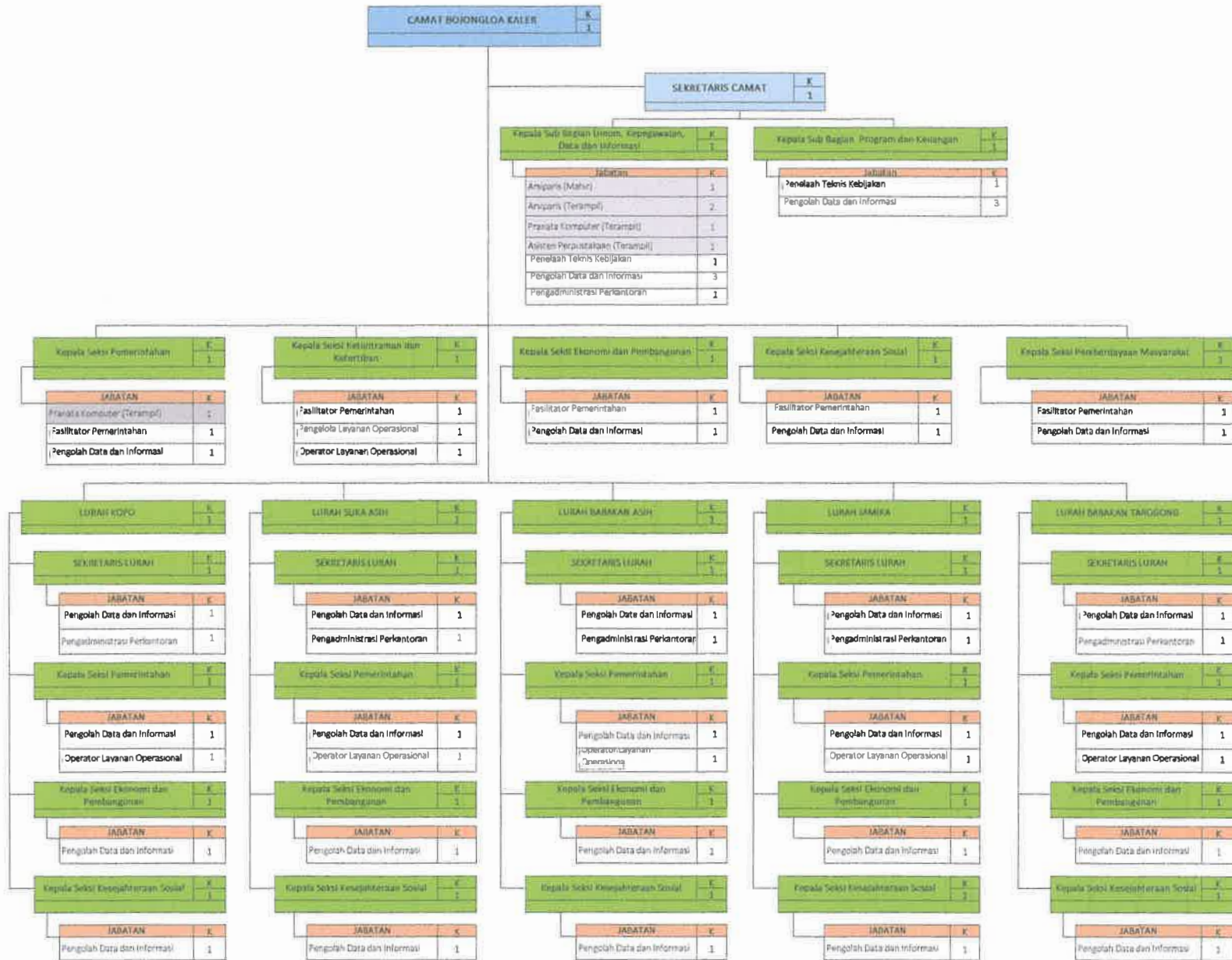
PETA JABATAN KECAMATAN BANDUNG WETAN

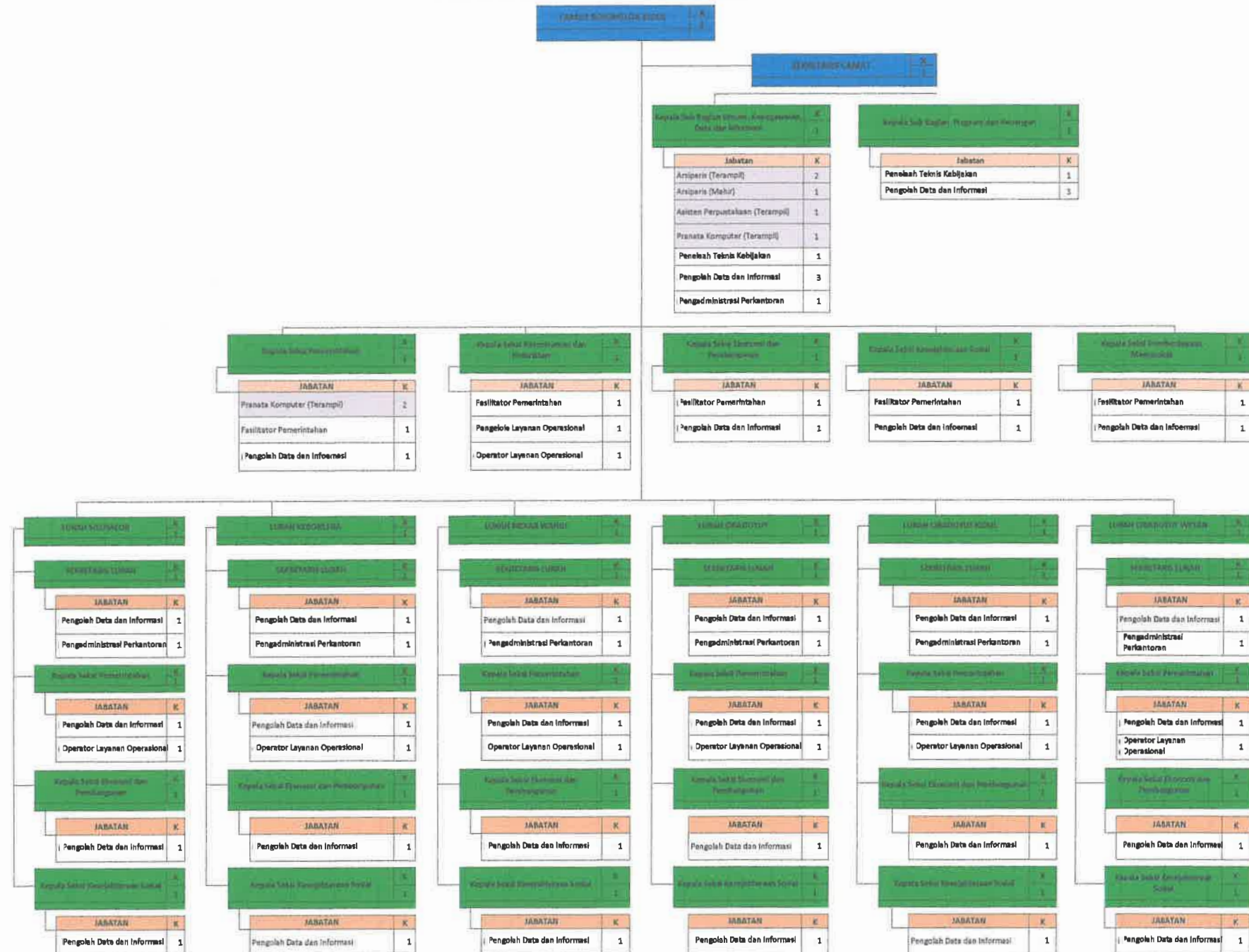


PETA JABATAN KECAMATAN BATUNUNGGAL

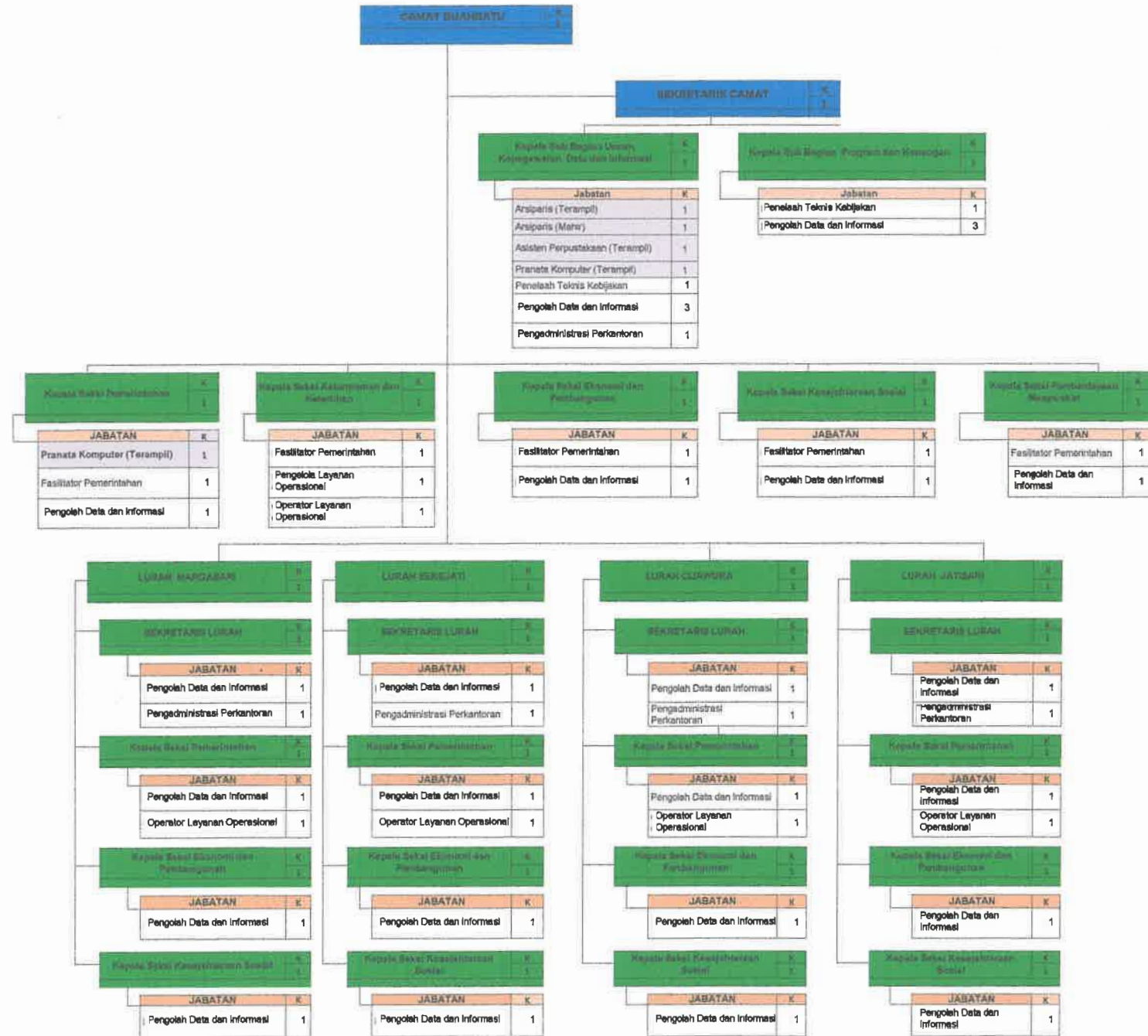


PETA JABATAN KECAMATAN BOJONGLOA KALER

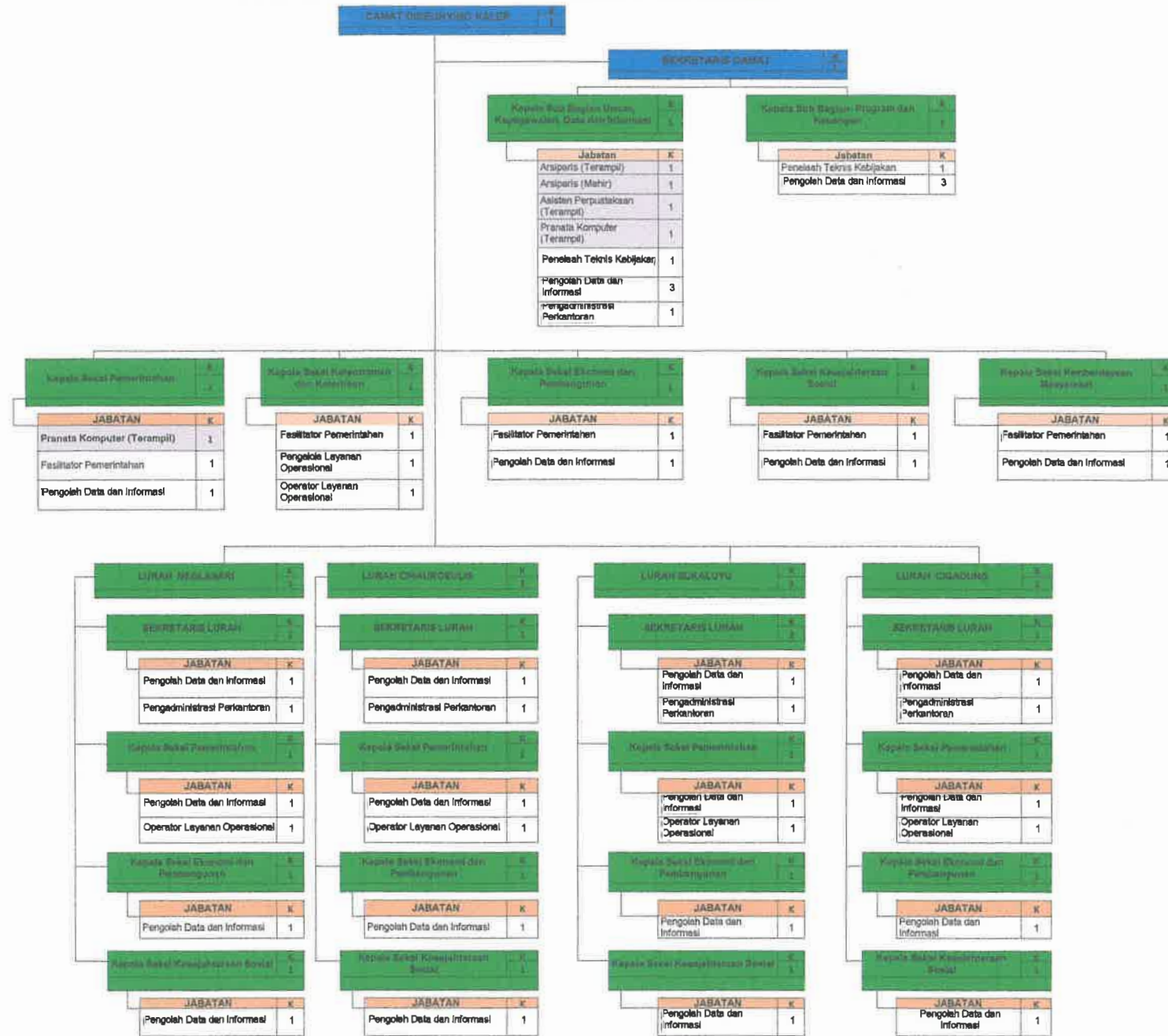




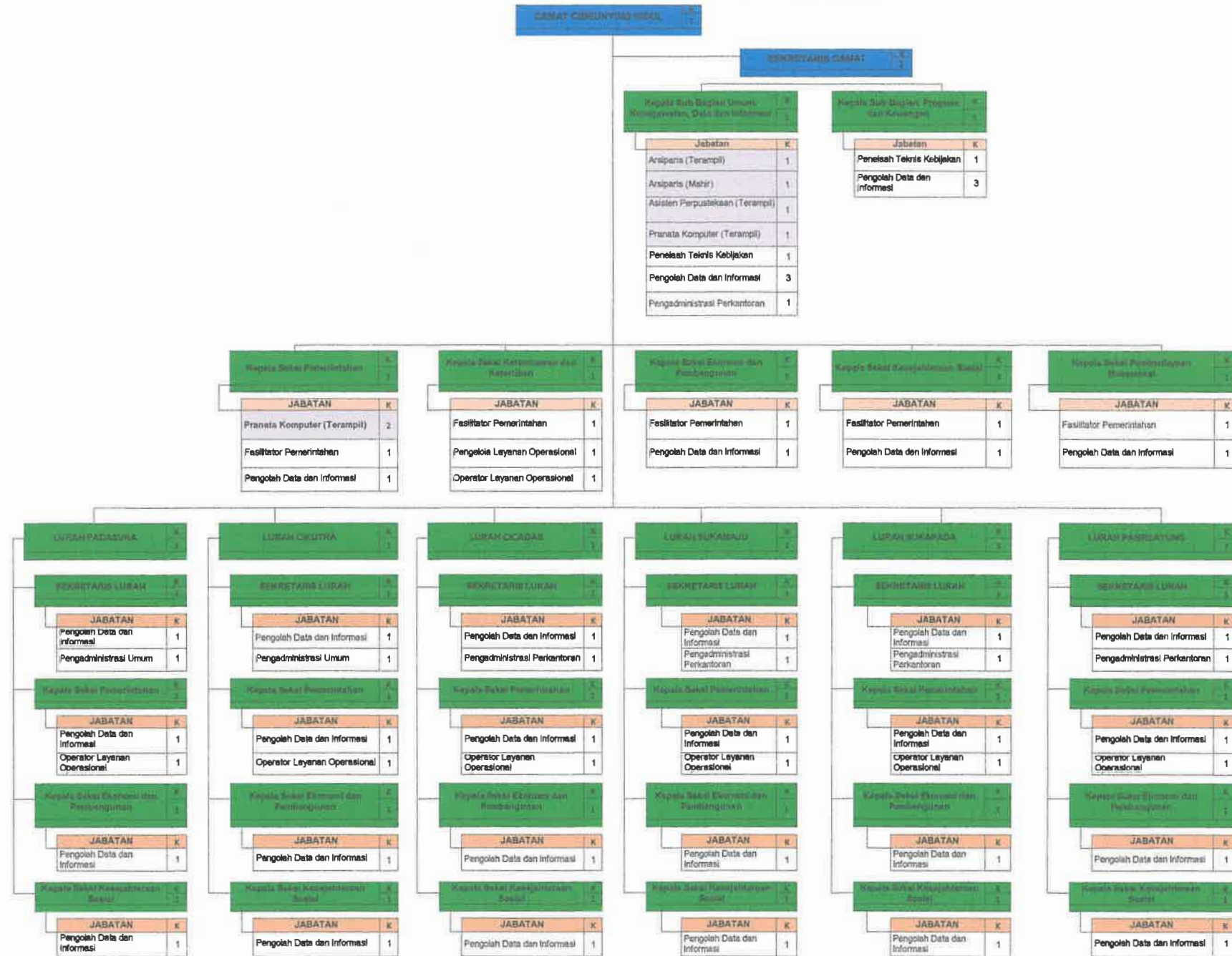
PETA JABATAN KECAMATAN BUAH BATU



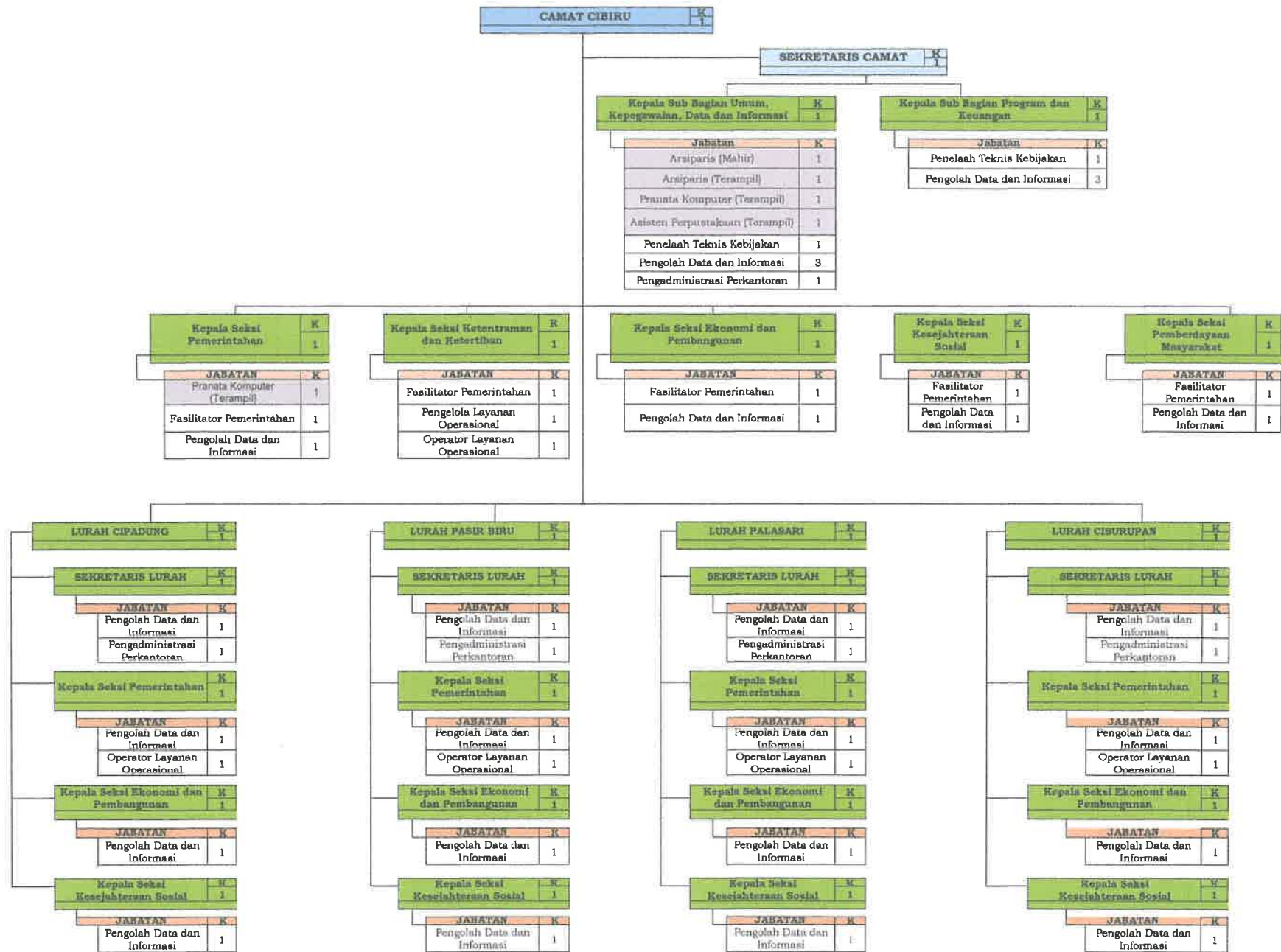
PETA JABATAN KECAMATAN CIBEUNYING KALER



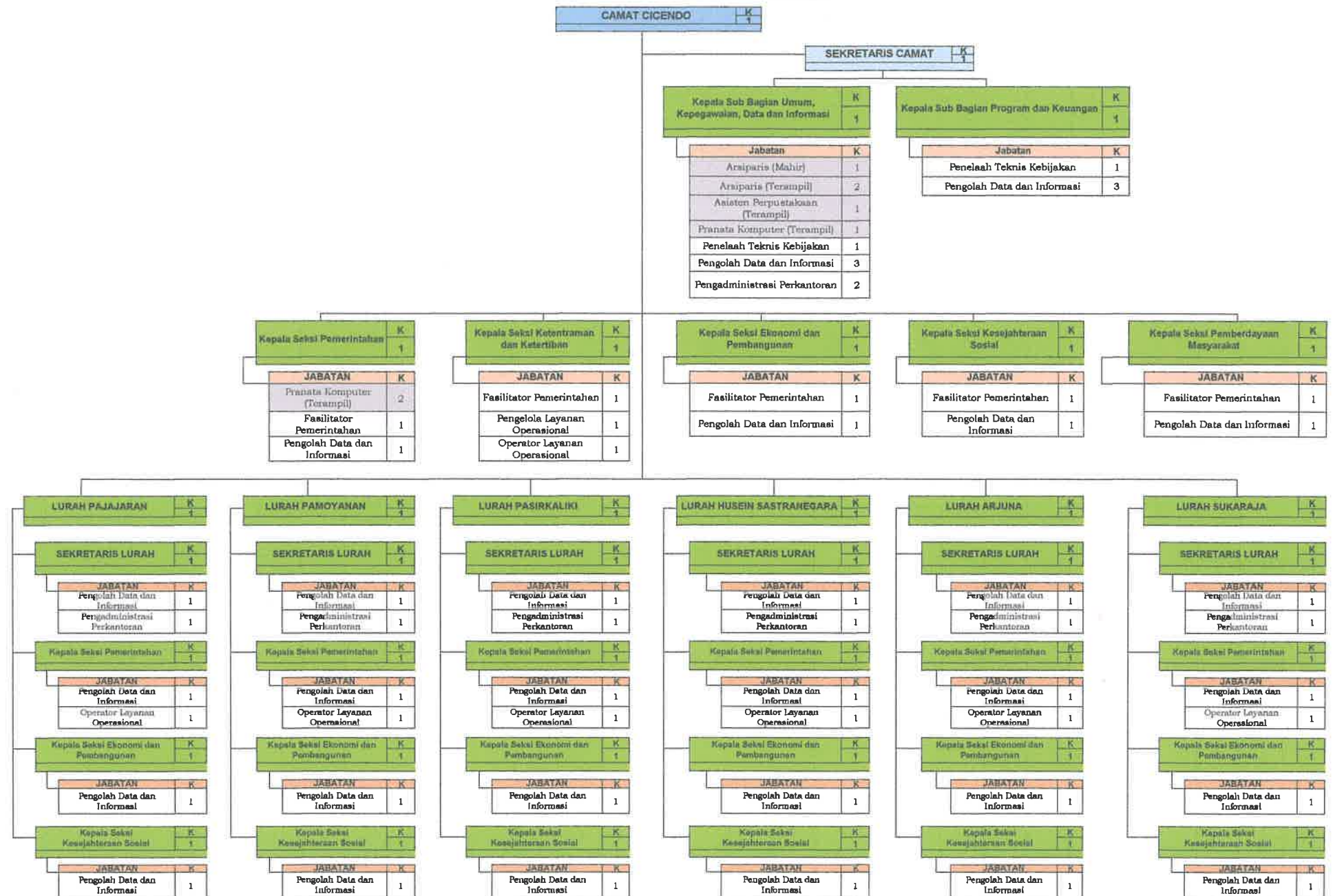
PETA JABATAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL



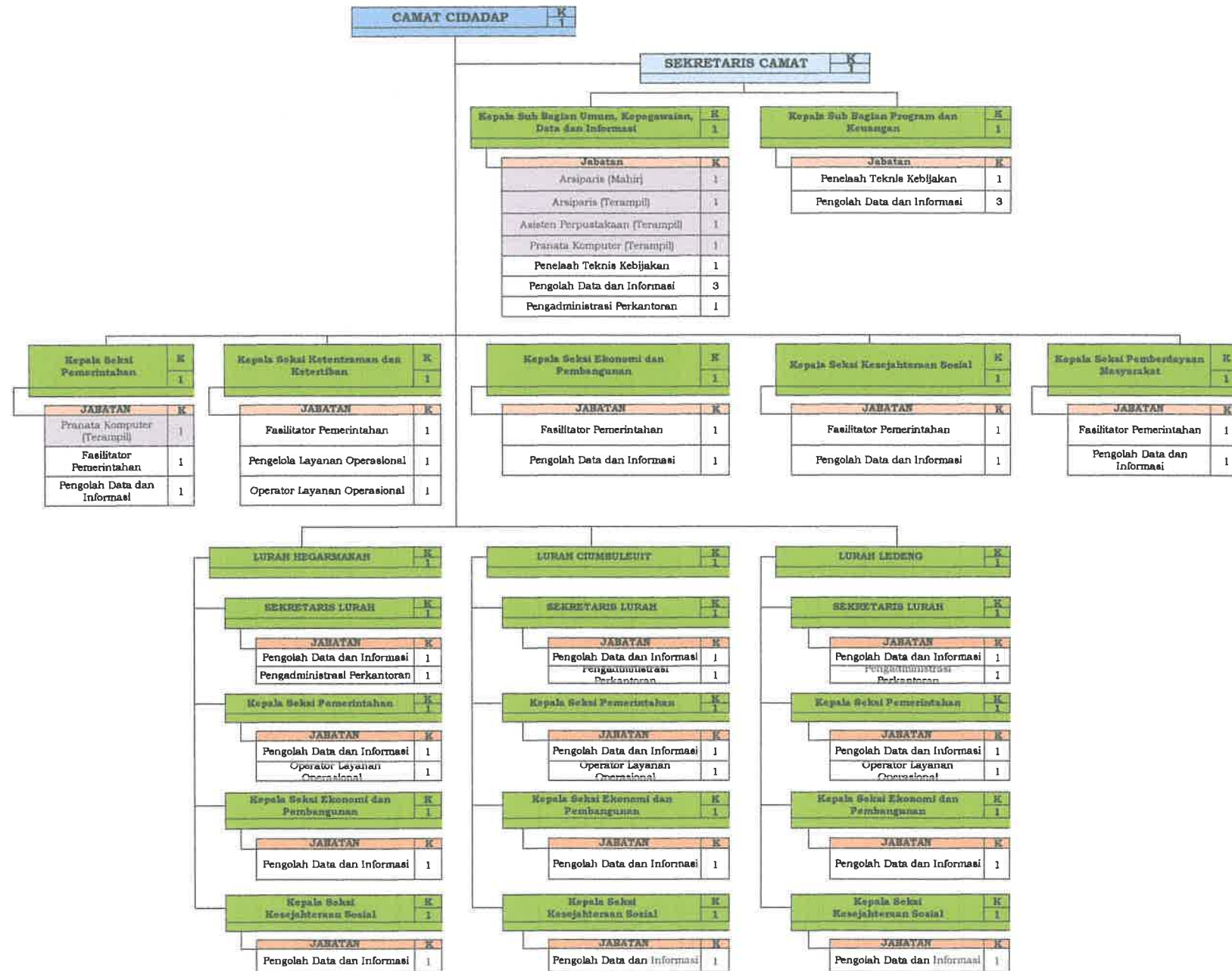
49
PETA JABATAN KECAMATAN CIBIRU



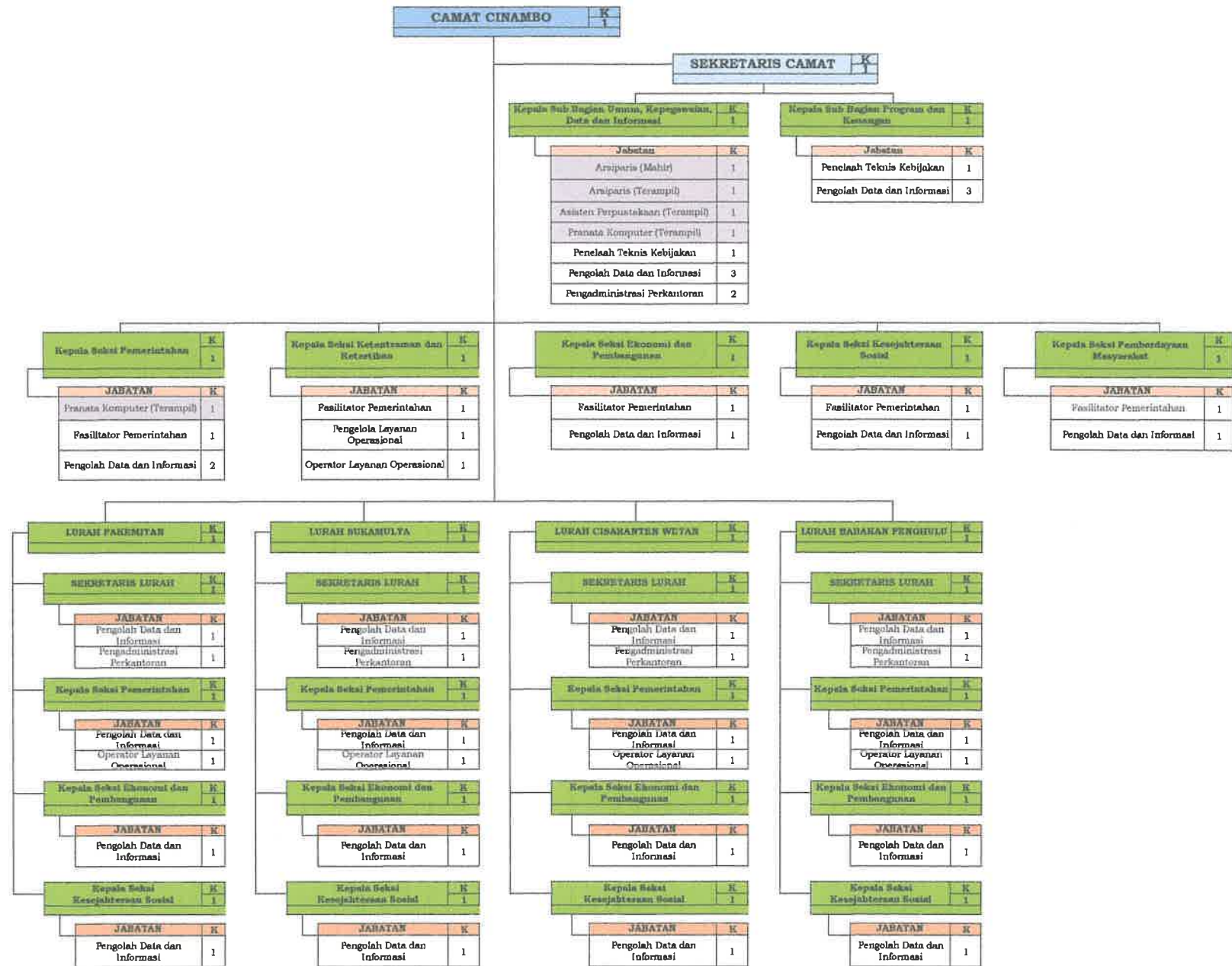
50
PETA JABATAN KECAMATAN CICENDO



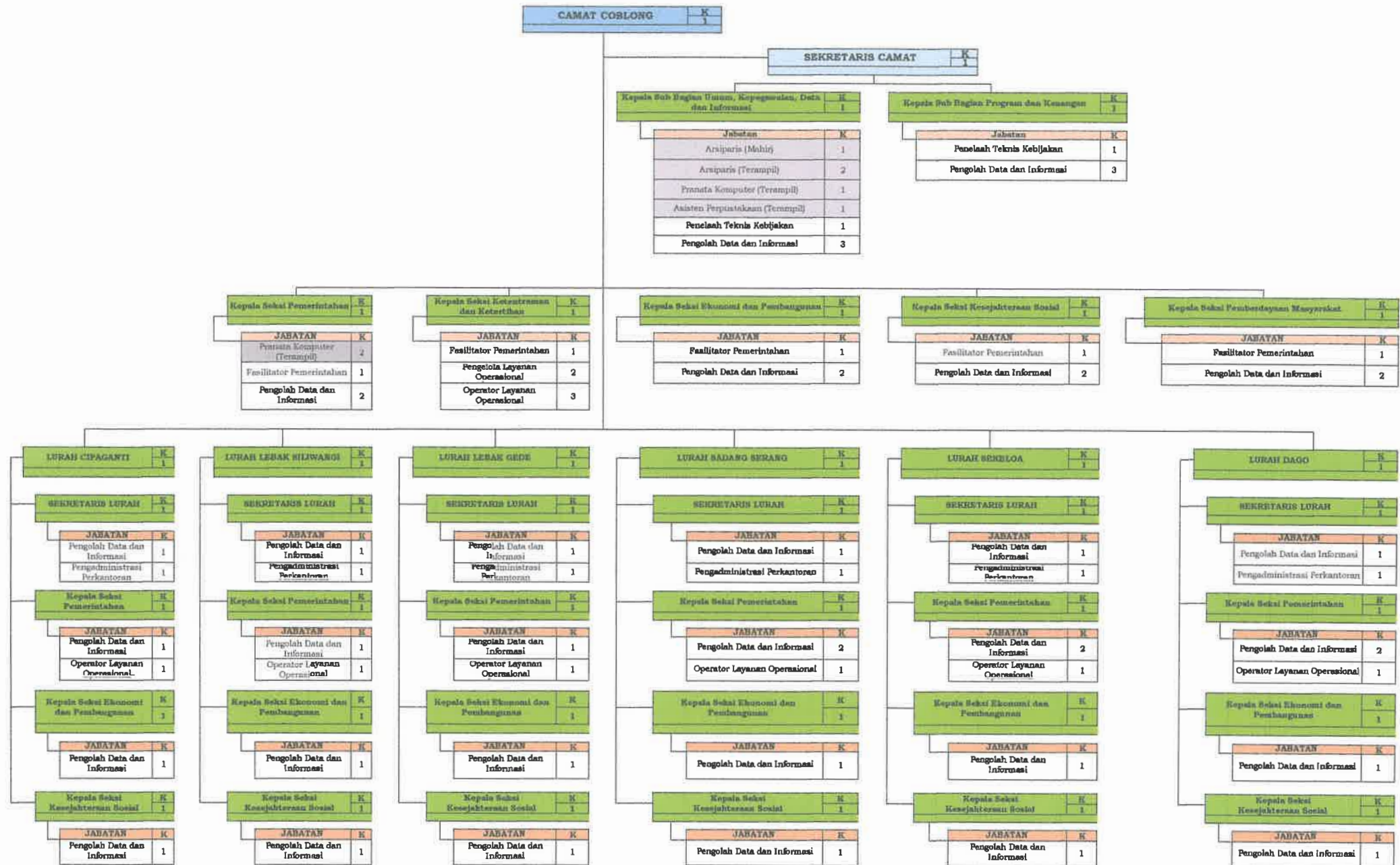
PETA JABATAN KECAMATAN CIDADAP



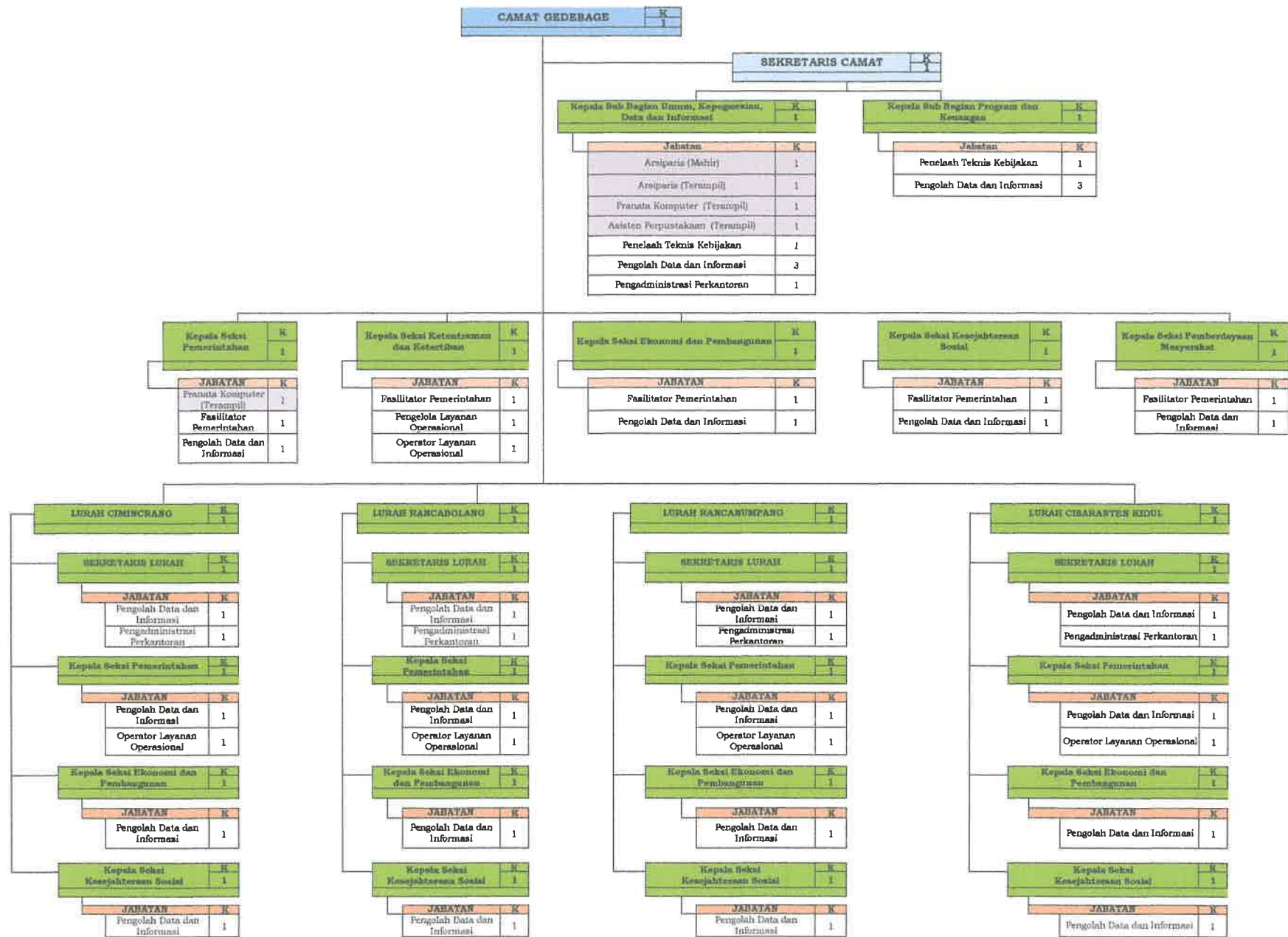
PETA JABATAN KECAMATAN CINAMBO



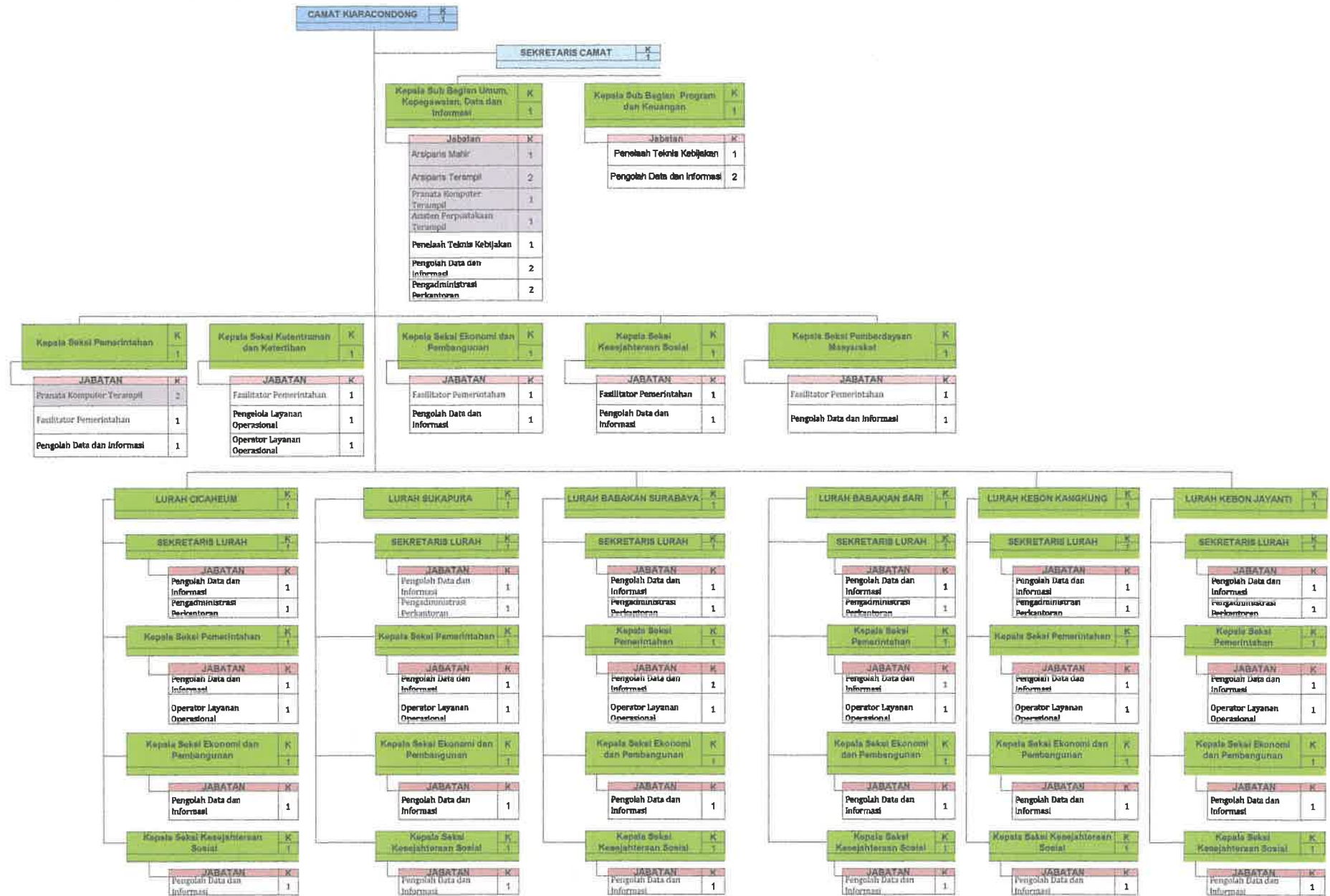
53
PETA JABATAN KECAMATAN COBLONG



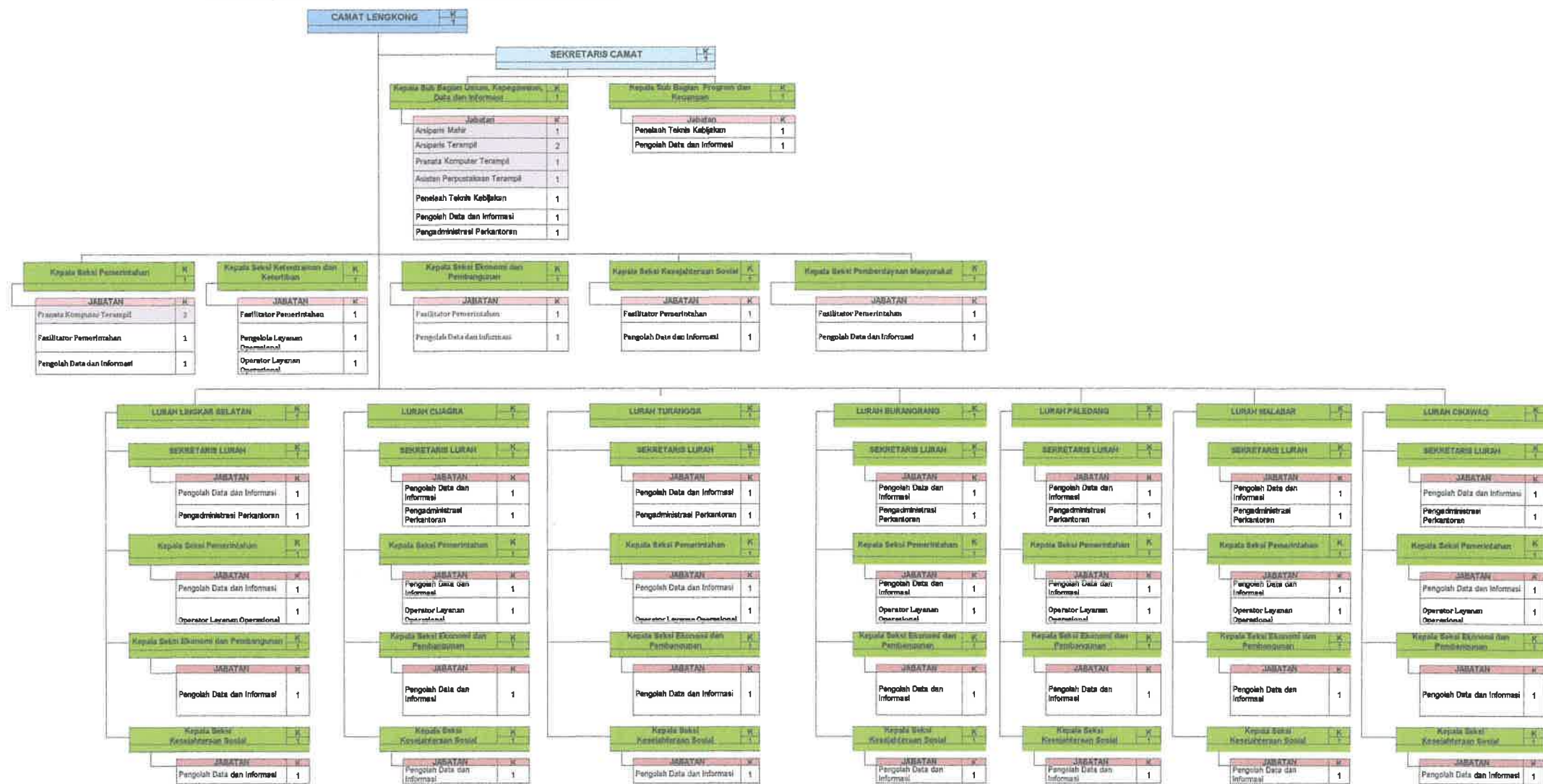
PETA JABATAN KECAMATAN GEDEBAGE



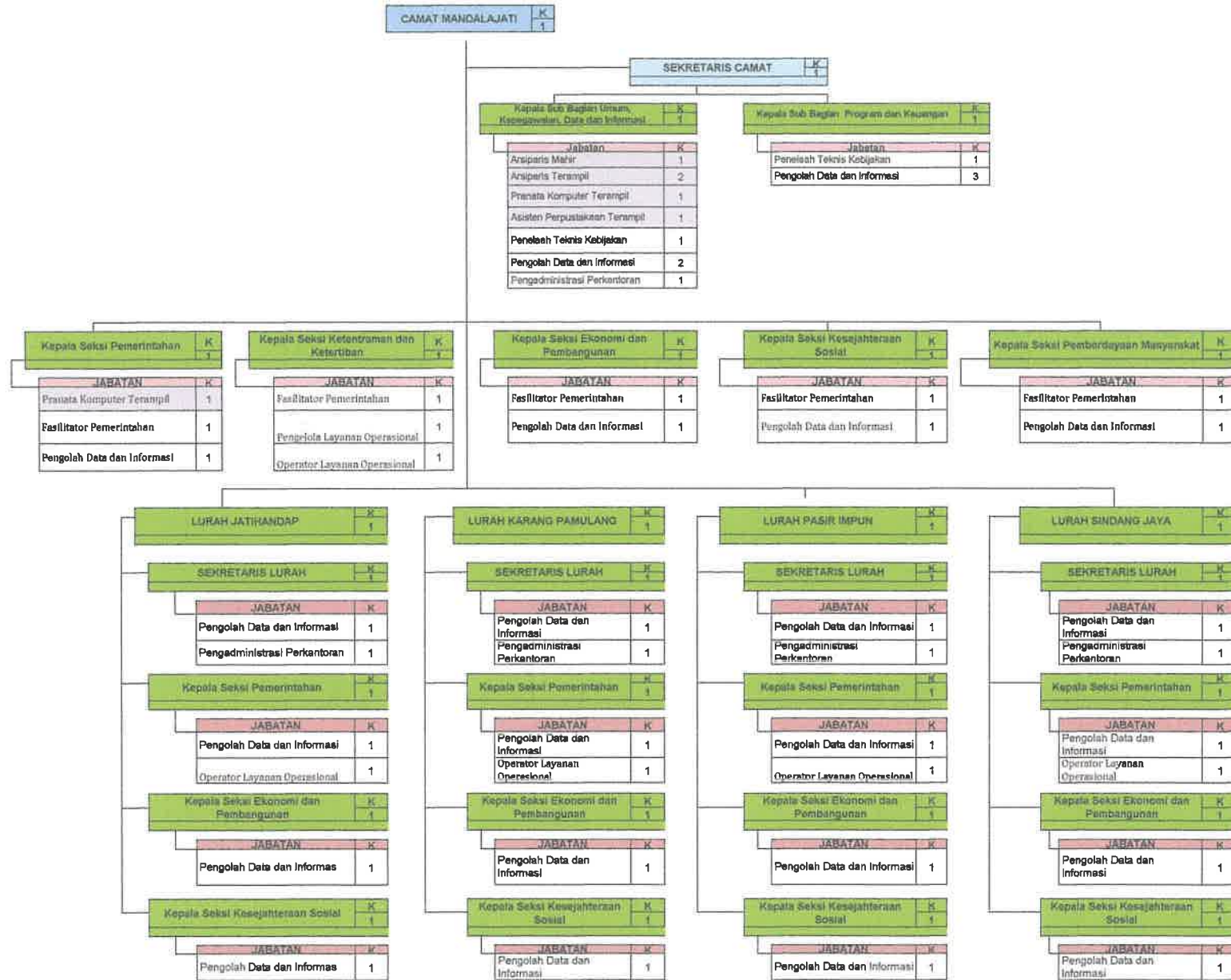
PETA JABATAN KECAMATAN KIARAONDONG



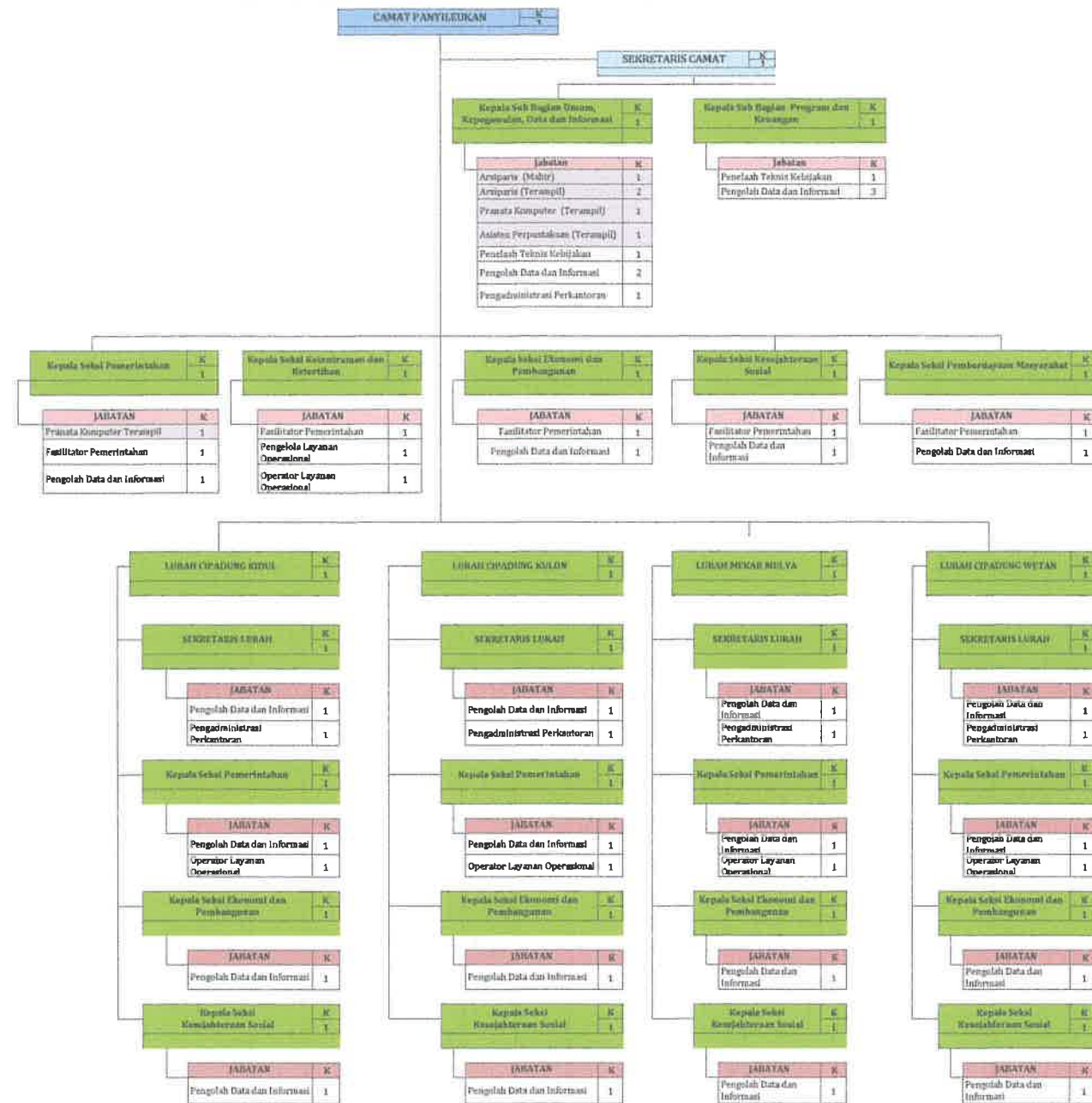
PETA JABATAN KECAMATAN LENGKONG



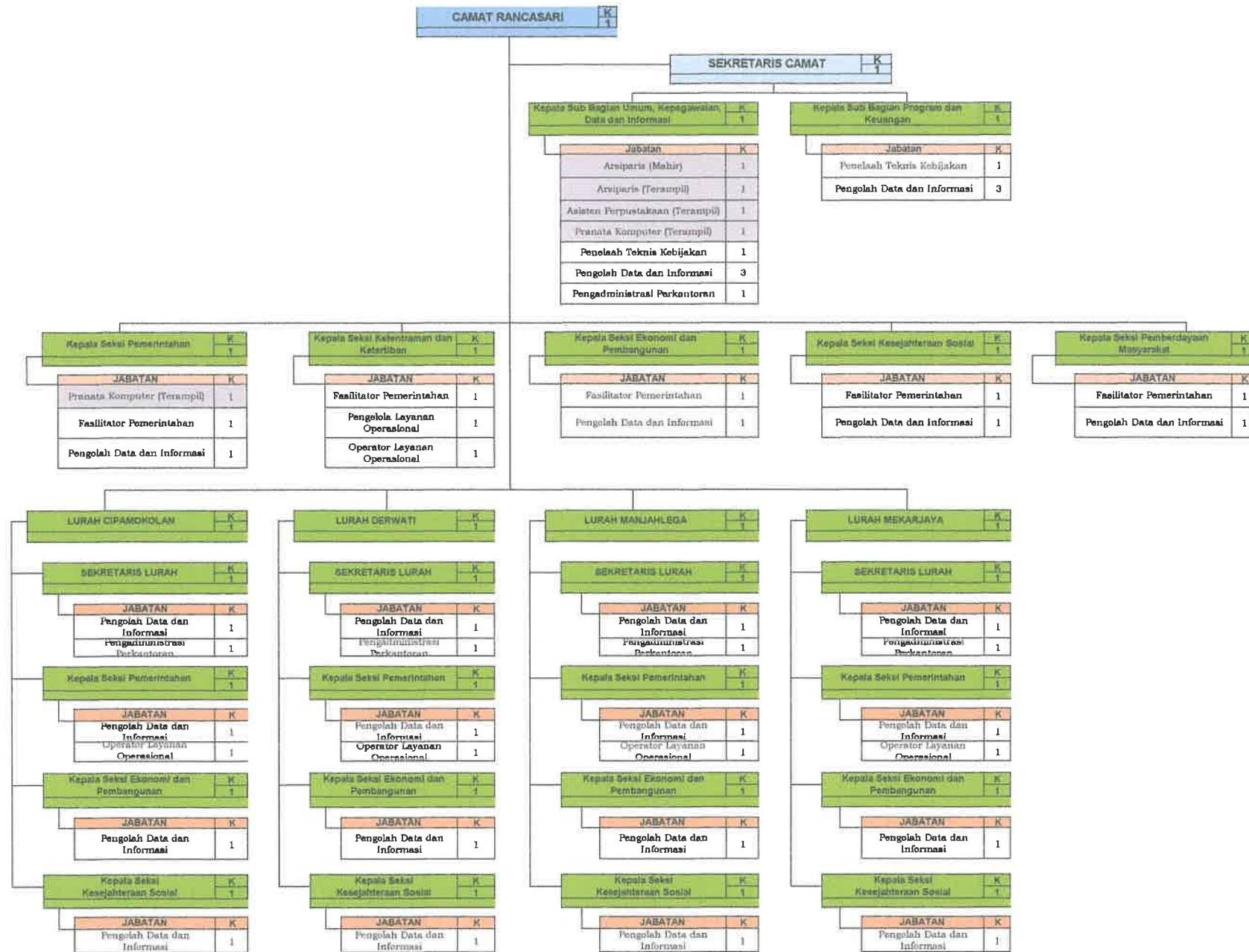
PETA JABATAN KECAMATAN MANDALAJATI



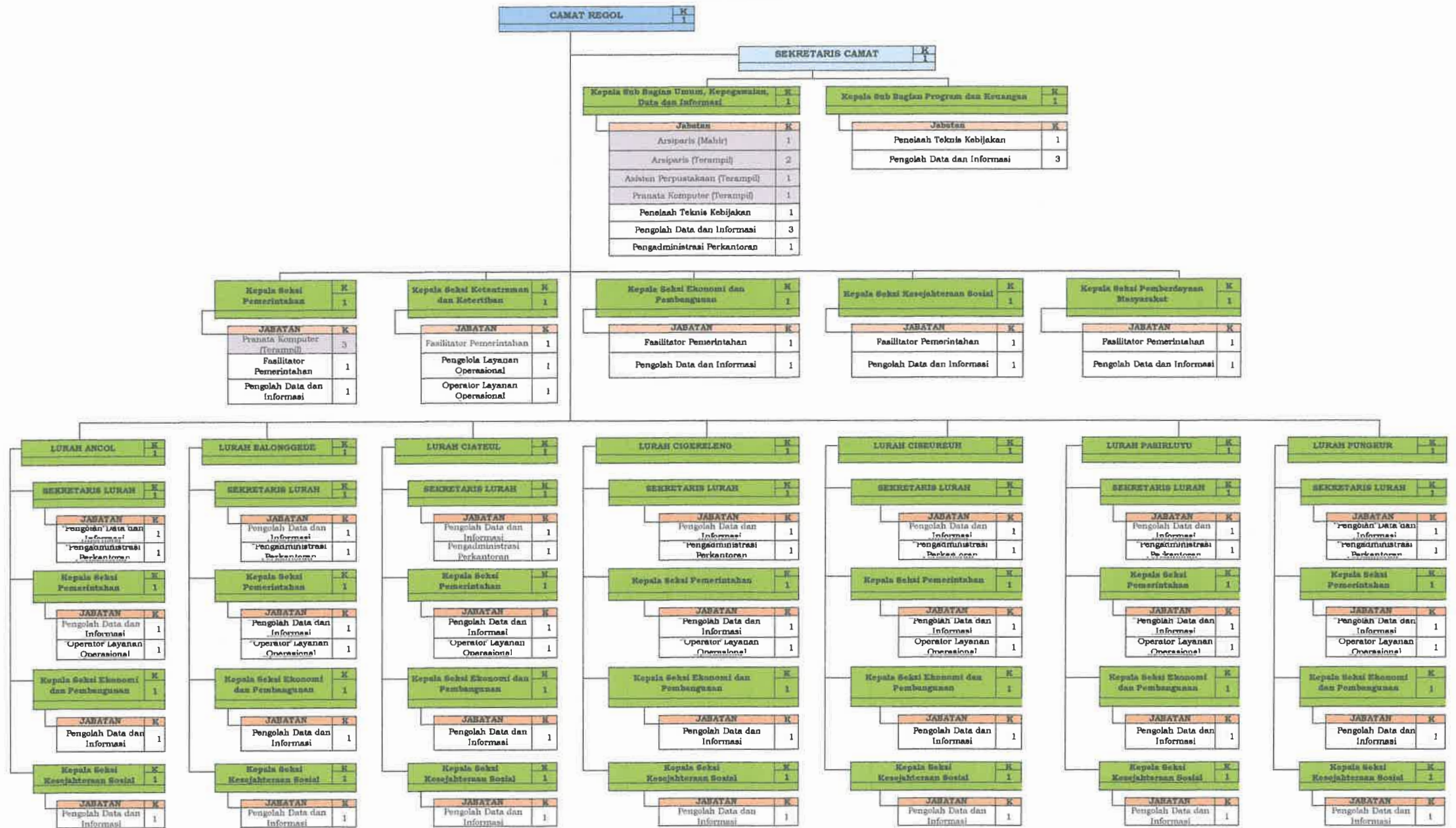
PETA JABATAN KECAMATAN PANYILEUKAN



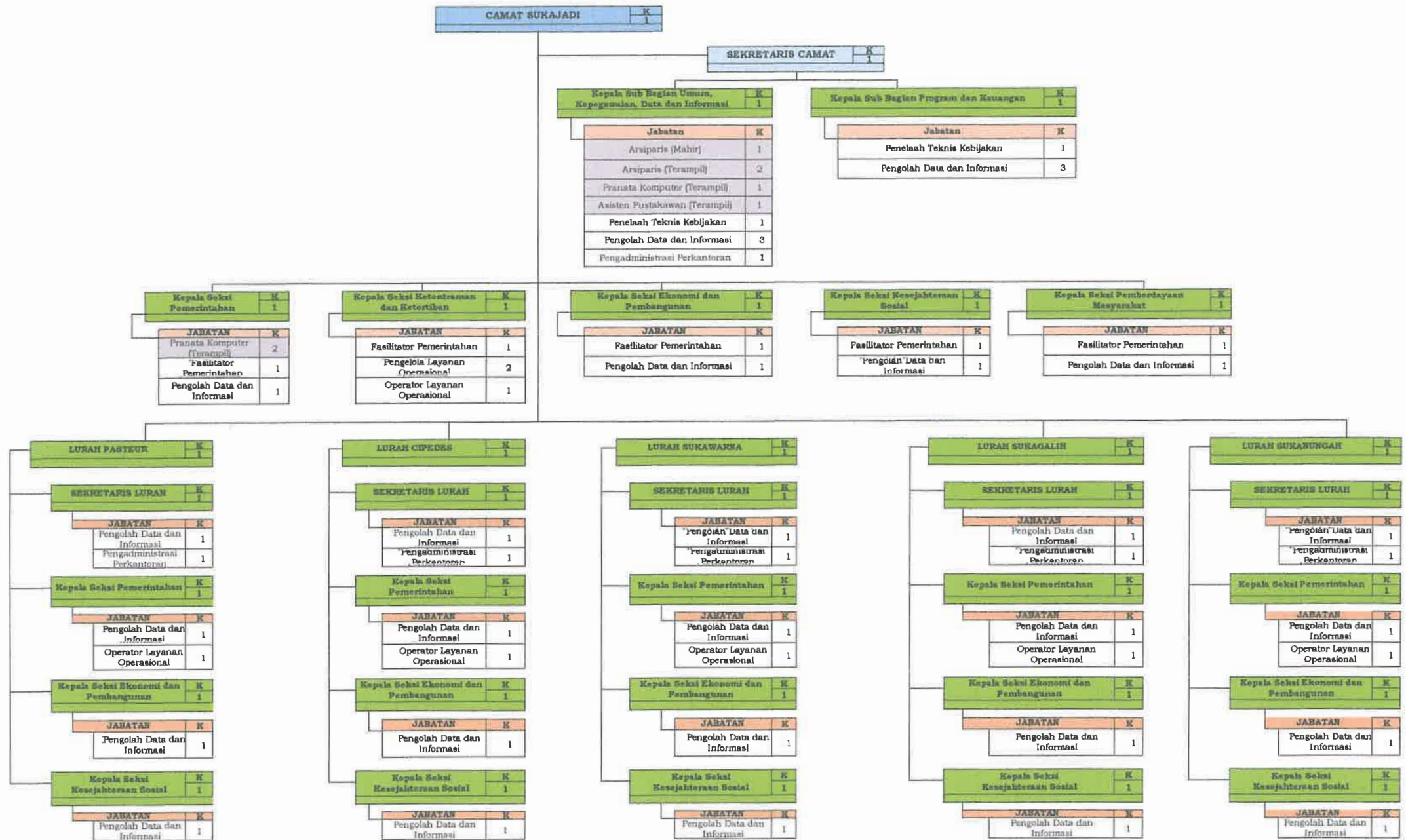
PETA JABATAN KECAMATAN RANCASARI



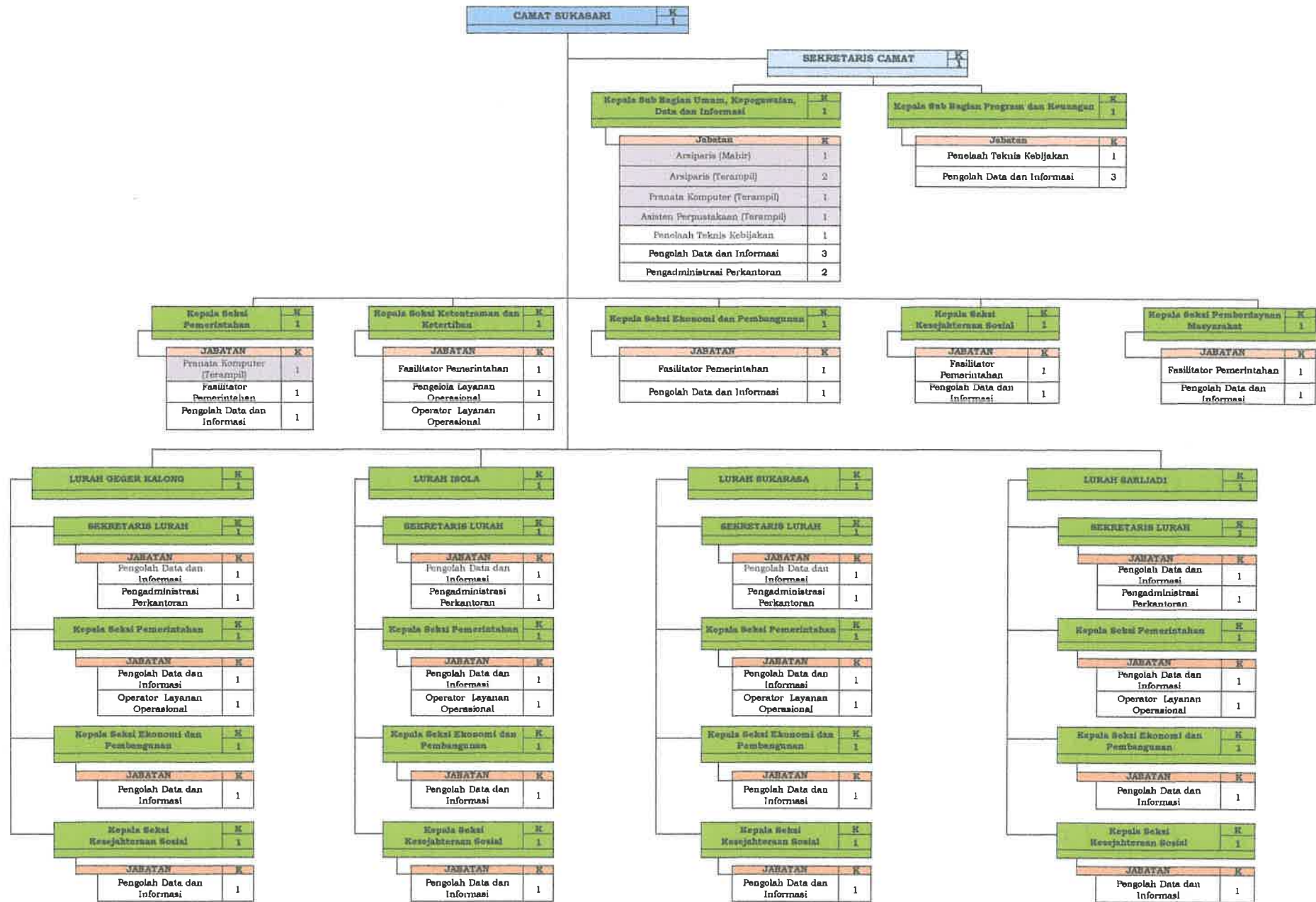
PETA JABATAN KECAMATAN REGOL



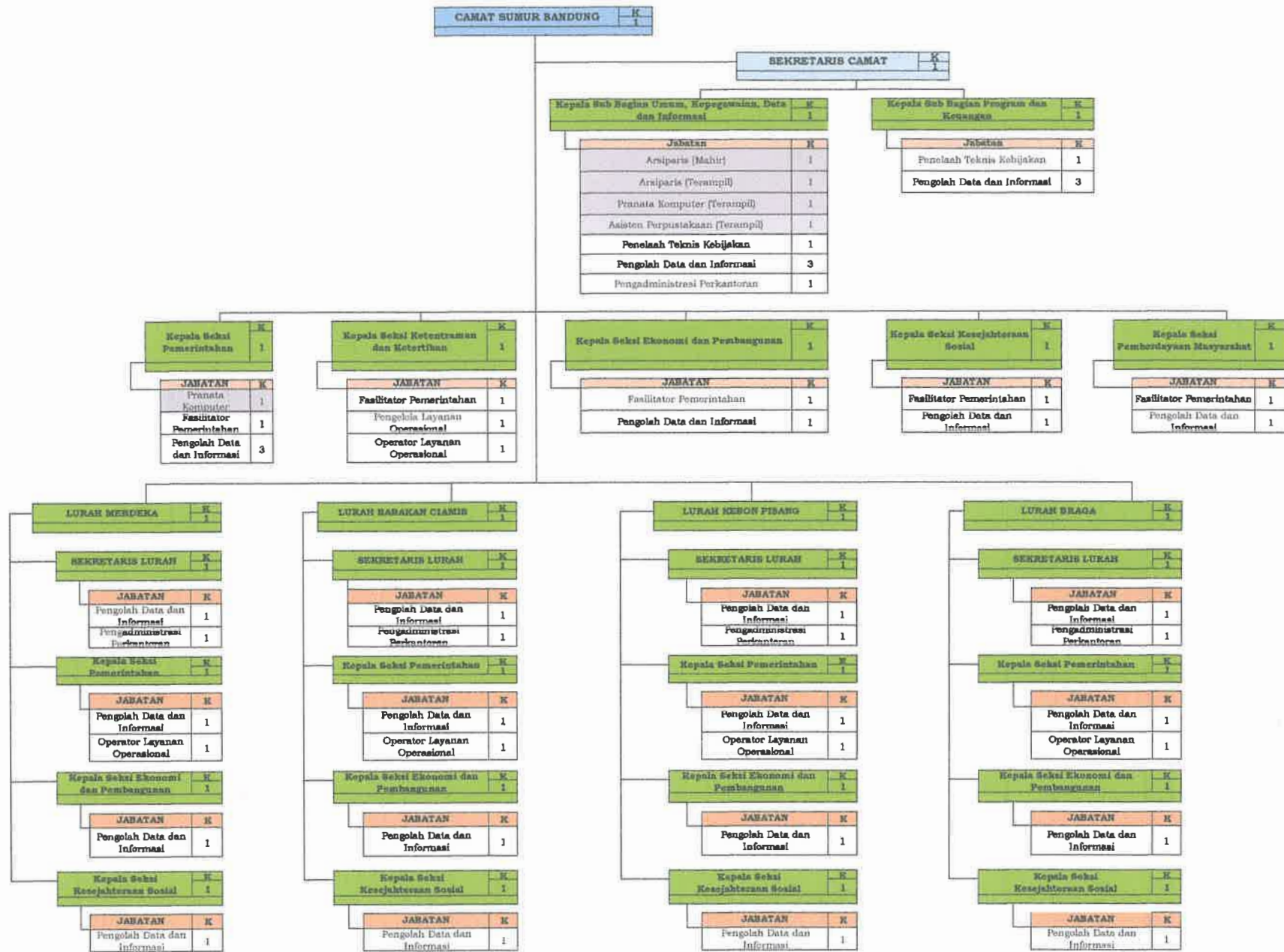
61
PETA JABATAN KECAMATAN SUKAJADI



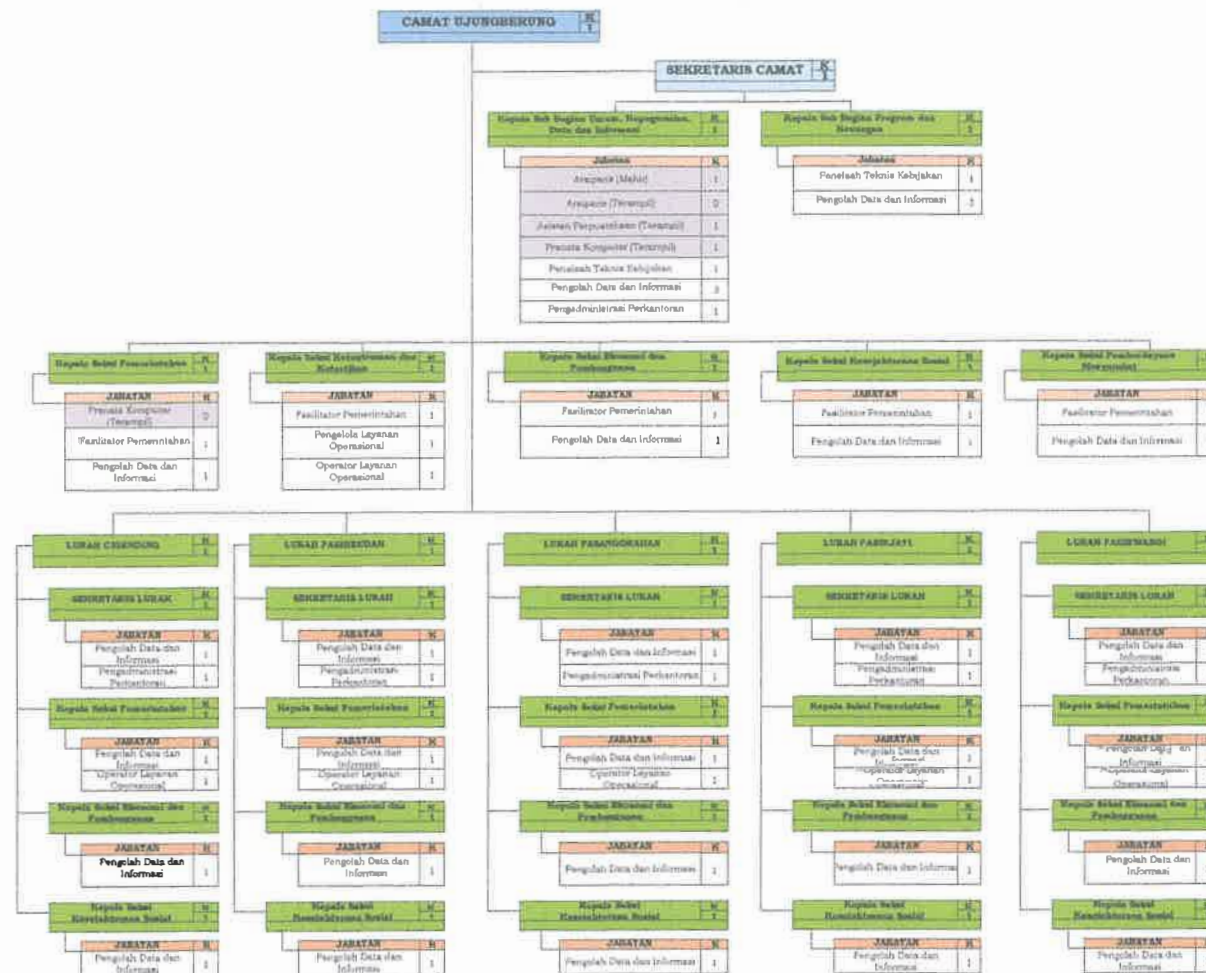
PETA JABATAN KECAMATAN SUKASARI



PETA JABATAN KECAMATAN SUMUR BANDUNG



PETA JABATAN KECAMATAN UJUNGBERUNG



Keterangan:

K = Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

